

2022

LAPORAN TAHUNAN



**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAM**

DITERBITKAN OLEH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

PENYUSUN
SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
SEKRETARIAT BPSDM HUKUM DAN HAM

BPSDM HUKUM DAN HAM
JALAN RAYA GANDUL NO.4
CINERE DEPOK JAWA BARAT
www.bpsdm.kemenkumham.go.id



KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menyelenggarakan pelatihan, pendidikan, serta penilaian kompetensi pada Tahun Anggaran 2022 dan dapat menyelesaikan penyusunan

Laporan Tahunan merupakan bentuk pertanggungjawaban Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaporkan kinerja organisasi serta kinerja anggaran selama Tahun Anggaran 2022. Penyusunan Laporan Tahunan ini mencakup keberhasilan, hambatan, serta tantangan yang dihadapi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Tahun Anggaran 2022.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada seluruh pihak, baik internal maupun eksternal Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah mendukung dan membantu dalam proses penyusunan Laporan Tahunan ini. Dengan tersusunnya Laporan Tahunan ini diharapkan dapat menjadi bahan atau acuan bagi para pengambil keputusan dalam menentukan arah kebijakan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan pada Tahun 2023. Kami menyadari bahwa Laporan Tahunan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami terbuka dan menerima segala kritik serta saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Akhir kata, semoga Laporan Tahunan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2022 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Depok, 10 Maret 2023
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan HAM



Dr. Asep Kurnia



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Ruang Lingkup Pembahasan	4
D. Sistematika Pelaporan	5
BAB II DATA RENCANA KERJA	6
A. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM	6
B. Rencana Strategis BPSDM Hukum dan HAM	9
C. Sasaran Kinerja BPSDM Hukum dan HAM	10
D. Rencana Penyerapan Anggaran BPSDM Hukum dan HAM	29
E. Sumber Daya Manusia BPSDM Hukum dan HAM	30
BAB III CAPAIAN KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM	31
A. Capaian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM	31
B. Implementasi Reformasi Birokrasi	85
C. Kegiatan Kerjasama BPSDM Hukum dan HAM	91
D. Prestasi BPSDM Hukum dan HAM	92
BAB IV PENUTUP	97
A. Simpulan	97
B. Saran	100

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia (BPSDM Hukum dan HAM) merupakan Unit Eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang hukum dan hak asasi manusia. BPSDM Hukum dan HAM bertanggung jawab dalam melakukan pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bentuk pengembangan SDM yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM adalah Pendidikan dan Pelatihan. Pendidikan diselenggarakan oleh satuan kerja BPSDM Hukum dan HAM yaitu Politeknik Ilmu Pemasaryakatan dan Politeknik Imigrasi. Pengembangan SDM dalam bentuk Pelatihan diselenggarakan oleh unit BPSDM Hukum dan HAM yaitu Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan serta Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM.

Pada Tahun Anggaran 2022, BPSDM Hukum dan HAM telah menyelenggarakan pengembangan dengan output peserta sebanyak 115.217 pegawai Kementerian Hukum dan HAM. Output tersebut dapat tercapai karena BPSDM Hukum dan HAM telah melakukan peningkatan dalam hal pelayanan pelatihan dengan cara menambah metode pengembangan kompetensi yaitu *Massive Open Online Courses* (MOOC). Dengan bertambahnya metode pengembangan kompetensi, output pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang mendapatkan pengembangan kompetensi dapat melebihi target yang telah ditetapkan walaupun pada tahun tersebut BPSDM Hukum dan HAM beberapa kali mengalami *Automatic Adjustmen*. Dari jumlah output pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi, sebanyak 17.615 pegawai mengikuti pelatihan secara Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Tatap Muka (Klasikal), atau *E-Learning* dan sejumlah 97.602 pegawai Kementerian Hukum dan HAM telah mengikuti MOOC. BPSDM Hukum dan HAM juga menyelenggarakan pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak sebanyak 270 peserta dan Pembimbing Kemasyarakatan sebanyak 320 peserta sebagai bentuk pemenuhan kegiatan berskala program prioritas nasional.

BPSDM Hukum dan HAM juga menyelenggarakan pendidikan sehingga mencetak kader di bidang pemsaryakatan dan keimigrasian melalui Poltikenik Ilmu Pemsaryakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM). Pada Tahun Anggaran 2022, sebanyak 1.305 taruna mengikuti pendidikan kedinasan POLTEKIP dan sebanyak 1.483 taruna mengikuti pendidikan kedinasan POLTEKIM. Pada bulan

Desember 2022, sebanyak 300 taruna Tingkat IV POLTEKIP dan 290 taruna Tingkat IV POLTEKIM telah dinyatakan lulus mengikuti pendidikan kedinasan.

Selain penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, BPSDM Hukum dan HAM juga menyelenggarakan penilaian kompetensi bagi pegawai Kementerian Hukum dan HAM melalui Pusat Penilaian Kompetensi. Pada Tahun Anggaran 2022, Pusat Penilaian Kompetensi telah melakukan penilaian kompetensi kepada 12.938 pegawai melalui kegiatan Penilaian Kompetensi dan Potensi, serta Penilaian Preferensi Kompetensi. Hasil penilaian kompetensi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar untuk pembentukan pola karir dan pengembangan pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Dari sisi penyerapan anggaran, Per 31 Desember 2022 BPSDM Hukum dan HAM telah mencatat realisasi anggaran sebesar Rp. 223.990.194.502,- atau telah mencapai 97,63% dari pagu anggaran yang terdapat dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 229.437.166.000,-. Berikut rincian pagu anggaran serta realisasi per unit dan satuan kerja BPSDM Hukum dan HAM:

NO	UNIT/SATUAN KERJA	PAGU ANGGARAN (dalam Rp)	REALISASI ANGGARAN (dalam Rp)	%
1	Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM	9.964.138.000	9.276.644.582	93,10
2	Pusat Penilaian Kompetensi	2.881.200.000	2.822.627.967	97,97
3	Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan	11.887.966.000	11.114.812.491	93,50
4	Sekretariat Badan	75.033.005.000	73.808.430.958	98,37
5	Politeknik Imigrasi	40.605.465.000	40.480.127.662	99,69
6	Politeknik Ilmu Pemasarakatan	41.024.600.000	40.867.901.537	99,62
7	Balai Diklat Kepulauan Riau	11.434.479.000	11.320.648.813	99,00
8	Balai Diklat Jawa Tengah	20.999.928.000	20.506.419.479	97,65
9	Balai Diklat Sulawesi Utara	15.606.385.000	15.264.264.439	97,81
JUMLAH		229.437.166.000	225.461.877.928	98,27

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM Hukum dan HAM sebagai pelaksana dalam pengembangan kompetensi aparatur di bidang hukum dan HAM, terdapat beberapa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi oleh BPSDM Hukum dan HAM adalah adanya kebijakan *Automatic Adjustmen*. *Automatic Adjustment*

merupakan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah untuk melakukan penyesuaian anggaran secara otomatis, mencakup realokasi anggaran, pemotongan anggaran belanja Negara, penyesuaian pagu, dan/atau pergeseran anggaran antarprogram. Dengan adanya kebijakan tersebut, beberapa kegiatan pelatihan serta penilaian kompetensi di tahun 2022 tidak dapat terlaksana atau harus di revisi. Kendala lainnya adalah kurangnya jumlah SDM asesor yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan penilaian kompetensi kepada seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM setiap tahunnya.

BPSDM Hukum dan HAM selalu berusaha dalam melakukan perbaikan setiap tahunnya agar pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan baik. Salah satu upaya BPSDM Hukum dan HAM adalah menyelenggarakan pelatihan host pada Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan. Tujuan dari pelatihan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas SDM yaitu host pelatihan dalam mengelola pelatihan secara online menggunakan aplikasi *ZOOM Meeting*. Perjanjian Kinerja Pimpinan Tinggi serta Target Kinerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM juga perlu dilakukan pemantauan secara berkala sehingga dapat dipantau perkembangan dan kendala yang dihadapi.



PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu hak yang diperoleh sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah mendapatkan pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi yang dimaksud dapat melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Pemerintah memandang bahwa ASN memerlukan kompetensi yang memadai untuk dapat menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang dinamis, serta dapat menjadi penentu dalam kemajuan organisasi.

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk meningkatkan penguasaan teori dan keterampilan terhadap suatu persoalan untuk mencapai tujuan. Upaya ini dilakukan untuk memperbaiki tingkat produktifitas para pegawai dalam bekerja dan mengembangkan SDM dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi akibat perubahan lingkungan. Pendidikan dan pelatihan dapat membantu para pegawai menambah pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat menjalankan pekerjaan secara efektif dan efisien.

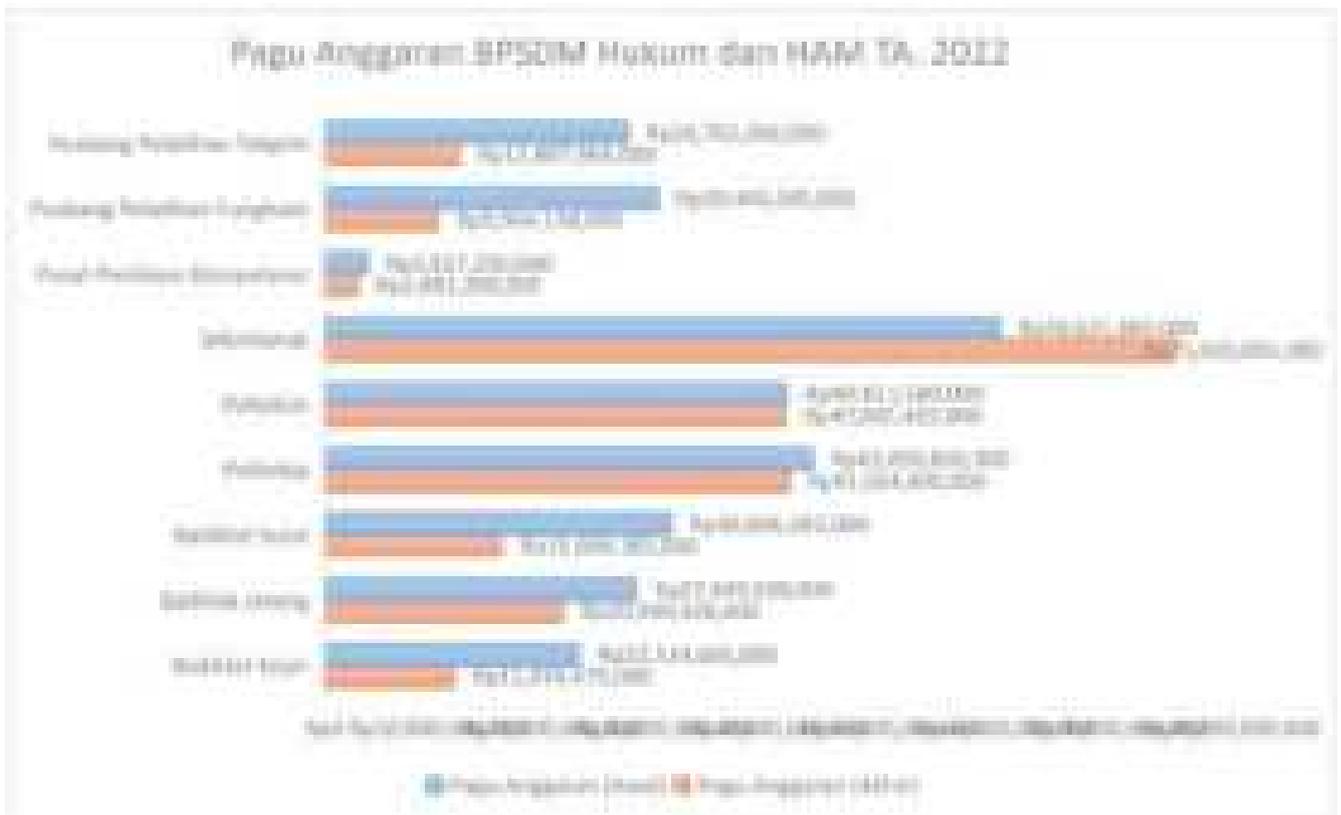


BPSDM Hukum dan HAM sebagai salah satu Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas dalam melakukan penyelenggaraan pengembangan SDM dituntut untuk mengembangkan kompetensi aparatur Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di bidang hukum dan HAM, sehingga

memiliki aparatur yang berdaya saing tinggi dan dapat memajukan organisasi. BPSDM Hukum dan HAM menyelenggarakan berbagai jenis pendidikan dan pelatihan, yaitu Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Pelatihan Fungsional dan HAM, Pendidikan Kedinasan Ilmu Pemasaryakatan, serta Pendidikan Kedinasan Imigrasi. Untuk mendukung pengembangan kompetensi yang efektif, maka perlu dilakukan penilaian dan pemetaan kompetensi pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang diselenggarakan oleh Pusat Penilaian Kompetensi.

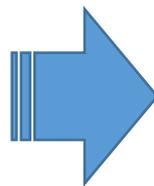
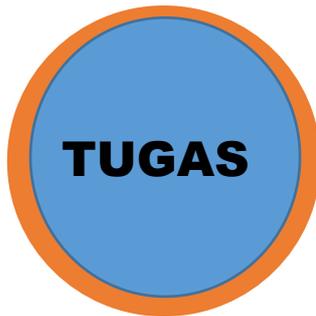
Alokasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2022, BPSDM Hukum dan HAM mendapat alokasi anggaran sejumlah Rp. 284.182.140,00 yang akan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi SDM serta penilaian dan pemetaan kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Namun dengan adanya kebijakan pemerintah terkait *Automatic Adjustmen*, mengakibatkan anggaran yang akan dimanfaatkan oleh BPSDM Hukum dan HAM mengalami penyesuaian guna mendukung program pemerintah, salah satunya yaitu untuk mengatasi pandemi virus corona. Oleh sebab itu, alokasi anggaran yang diterima BPSDM Hukum dan HAM pada tahun anggaran 2022 untuk melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebesar Rp. 229.437.166.000,00. Berikut rincian alokasi anggaran BPSDM Hukum dan HAM:



Tugas dan Fungsi

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM Hukum dan HAM sebagai salah satu Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 201 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia



Melaksanakan Pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia



- ▶ **01** Melakukan penelitian, analisis, program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- ▶ **02** Melakukan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- ▶ **03** Melakukan penelitian, analisis, program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- ▶ **04** Melakukan penelitian, analisis, program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- ▶ **05** Melakukan fungsi lain yang berkaitan erat dengan hukum dan hak asasi manusia.
- ▶ **06** Melakukan penelitian, analisis, program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Struktur Organisasi BPSDM Hukum dan HAM



B. Maksud dan Tujuan

Laporan Tahunan merupakan laporan yang disusun sebagai hasil evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM selama satu tahun kegiatan. Maksud dan Tujuan pembuatan Laporan Tahunan 2022 BPSDM Hukum dan HAM untuk:

1. Memberikan informasi kepada pimpinan organisasi berkenaan tingkat keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan pada Tahun 2022;
2. Bahan masukan Pimpinan BPSDM Hukum dan HAM dalam hal pengambilan keputusan berkenaan dengan model pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia hukum dan HAM serta program kerja yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM.

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan pada Laporan Tahun 2022 BPSDM Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh BPSDM Hukum dan HAM baik dalam bentuk Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) maupun non-diklat pada tahun 2022;
2. Pengelolaan Anggaran BPSDM Hukum dan HAM selama tahun anggaran 2022.

D. Sistematika Pelaporan

Sistematika Laporan Tahunan BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2021 tidak terlepas dalam Pedoman Penyusunan Laporan Tahunan Kementerian Hukum dan HAM, adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN;

Pada Bagian ini menguraikan gambaran umum dari satuan kerja dan hal-hal yang mendasari disusunnya laporan tahunan.

BAB II DATA RENCANA KINERJA;

Bagian ini menyajikan data dan kenyataan yang ada dilapangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja.

BAB III CAPAIAN KINERJA DAN IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI;

Bagian ini menyajikan analisa terhadap data dan kenyataan di lapangan mengenai hambatan serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN;

Bagian ini membuat saran dan usulan untuk mendapatkan pemecahan dan penyelesaian dari permasalahan yang ada.

DATA RENCANA KINERJA



BAB II DATA RENCANA KERJA

A. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Bab ini akan menguraikan tentang data kegiatan BPSDM Hukum dan HAM tahun 2022 berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir. Setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh BPSDM Hukum dan HAM mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Selain itu, Laporan Tahunan BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2022 juga memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BPSDM Hukum dan HAM yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 maupun Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.



Visi Kementerian Hukum dan HAM

Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan bahwa seluruh instansi pemerintahan harus memprioritaskan peningkatan produktivitas sebagai hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Setiap kegiatan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Selain itu Presiden juga menegaskan tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan

bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi Kementerian Hukum dan HAM

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu (1) penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, (2) perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara serta (3) pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Tujuan Kementerian Hukum dan HAM

Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
4. Terlindunginya hak asasi manusia.
5. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
6. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
7. Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

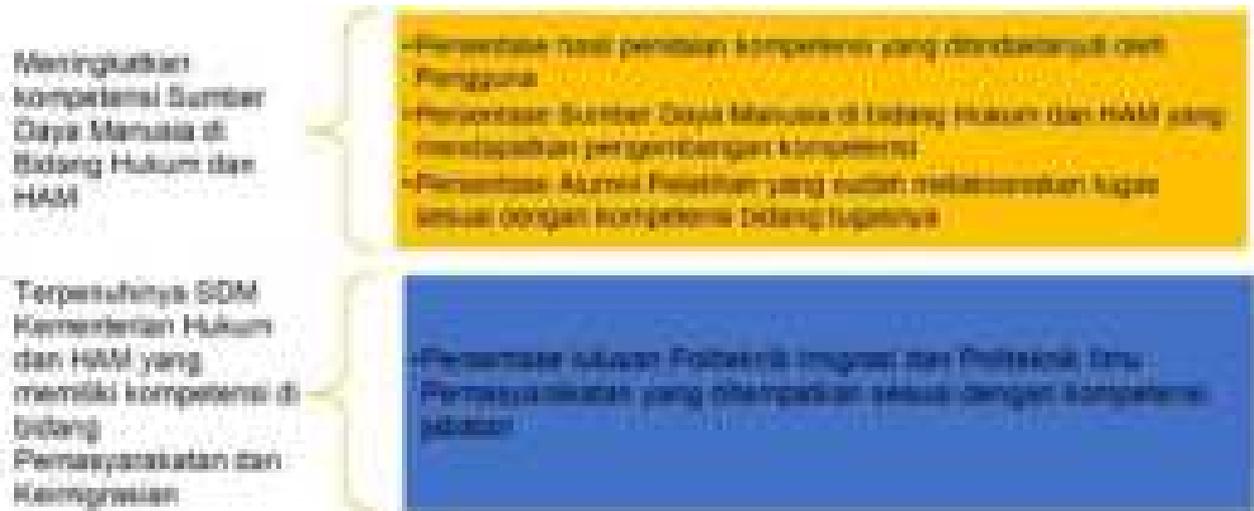
Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan.

1. Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM
3. Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik
4. Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional
5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
7. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di bidang hukum dan HAM
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien

B. Rencana Strategis BPSDM Hukum dan HAM

Rencana Strategis Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	Program Pendidikan dan Pelatihan aparatur hukum dan hak asasi manusia	Output Program Meningkatkan kompetensi SDM di bidang hukum dan hak asasi manusia Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi di bidang pelayanan publik dan kompetensi
Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden serta Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Masa yang Berdebat, Mandiri, dan Berkeadilan Berlandaskan Gerakan Rakyat	Misi Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas	Tujuan Menyajikan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran dan Indikator Kinerja Utama BPSDM Hukum dan HAM
Tahun Anggaran 2022



C. Sasaran Kinerja BPSDM Hukum dan HAM

1. Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

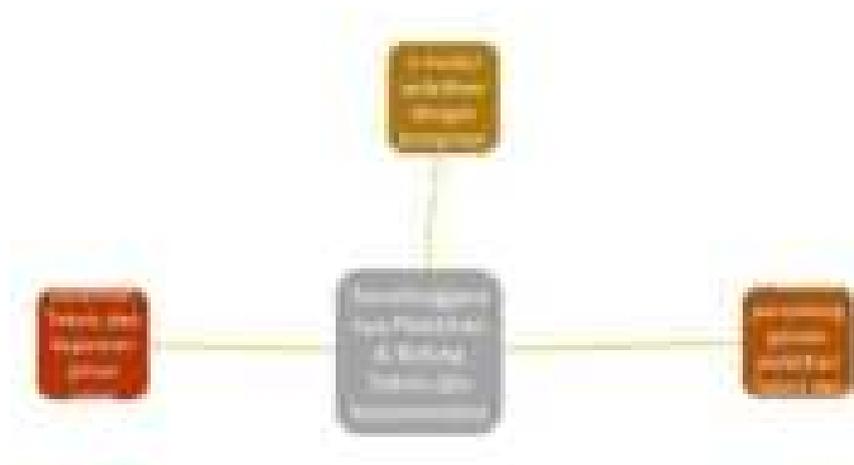
Tugas Pokok dan Fungsi

Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pelatihan teknis dan kepemimpinan.

Fungsi Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan adalah:

- Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program dan anggaran di bidang pendidikan dan pelatihan teknis dan kepemimpinan;
- Penyusunan pedoman dan program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan kepemimpinan;
- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan kepemimpinan;
- Koordinasi dan pembinaan teknis substansi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan kepemimpinan;
- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan kepemimpinan; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

Sasaran dan Indikator Kinerja Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan



Rencana Kerja

Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan pada Tahun 2022 menganggarkan pagu sebesar Rp. 11.887.966.000,- untuk melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Teknis dan Kepemimpinan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta pelatihan berbasis kompetensi di bidang Pelatihan Terpadu SPPA Bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya. Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada masing-masing bidang pada Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan :

- Bidang Program

Bidang Program Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 3.093.233.000,- yang digunakan untuk menyelenggarakan berbagai macam kegiatan terkait perencanaan penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi di bidang teknis dan kepemimpinan serta diklat berbasis kompetensi di bidang SPPA bagi aparat penegak hukum. Berikut rincian rencana kegiatan pada Bidang Program:



- Bidang Penyelenggaraan

Penyelenggaraan kegiatan pelatihan pada Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua 2 yaitu:

1. Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi di Bidang Teknis dan Kepemimpinan

Dengan anggaran sebesar Rp. 5.496.682.000,- ditargetkan pada tahun anggaran 2022 sebanyak 10.266 orang dapat ditingkatkan kompetensi melalui berbagai jenis pelatihan sebagai berikut:

NO	PELATIHAN	TARGET
1	Pelatihan Dasar CPNS bagi Alumni Poltekip dan Poltekim	550
2	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II	60
3	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	40
4	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	200
5	Pelatihan Tim Assesor PMPRB	30
6	Pendidikan Khusus Keimigrasian bagi Lulusan Program D-IV Poltekim	126
7	Pelatihan Teknik Audit Berbantuan Komputer	30
8	Pelatihan TI Pusdatin	18

9	ToT Pelatihan Imigrasi	80
10	ToT Pelatihan Pemasyarakatan	80
11	Pelatihan Petugas Pengamanan Tingkat Dasar	880
12	Pelatihan Petugas Pengamanan Tingkat Lanjutan bagi Petugas Lapas dan Rutan	800
13	Pelatihan Pelayanan Publik Tingkat Dasar	1.080
14	Pelatihan Pelayanan Publik Tk. Lanjutan	960
15	Pelatihan Reformasi Birokrasi	880
16	Pelatihan Administrasi Perkantoran Tk. Dasar	1.000
17	Pelatihan Administrasi Perkantoran Tk. Lanjutan	880
18	Pelatihan Pemeriksa Pelanggaran Tata Tertib	760
19	Pelatihan Pengadministrasian dan Perlengkapan Keamanan	1.000
20	Pelatihan Dasar CPNS	383
21	Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	160
22	Pelatihan Manajemen Resiko	40
23	Pelatihan Teknis Pengelolaan Perpustakaan	30
24	Pelatihan Layanan Perpustakaan	30
25	Pelatihan Host Online	120
26	Pelatihan Penanganan Pengaduan Masyarakat	30
27	Pelatihan Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Keolahragaan bagi Pegawai Kemenkumham	19
Total		10.266

2. Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi di Bidang SPPA bagi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya
 Anggaran sebesar Rp. 2.412.734.000,- disediakan untuk menghasilkan lulusan pelatihan di bidang SPPA sebanyak 270 orang yang terbagi dalam 9 angkatan serta ToT SPPA bagi pengajar pelatihan dengan target output sebanyak 90 orang.

NO	PELATIHAN	TARGET
1	Pelatihan Terpadu SPPA bagi Aparat Penegak Hukum Akt. 65	30
2	Pelatihan Terpadu SPPA bagi Aparat Penegak Hukum Akt. 66	30
3	Pelatihan Terpadu SPPA bagi Aparat Penegak Hukum Akt. 67	30
4	Pelatihan Terpadu SPPA bagi Aparat Penegak Hukum Akt. 68	30
5	Pelatihan Terpadu SPPA bagi Aparat Penegak Hukum Akt. 69	30
6	Pelatihan Terpadu SPPA bagi Aparat Penegak Hukum Akt. 70	30
7	Pelatihan Terpadu SPPA bagi Aparat Penegak Hukum Akt. 71	30
8	Pelatihan Terpadu SPPA bagi Aparat Penegak Hukum Akt. 72	30
9	Pelatihan Terpadu SPPA bagi Aparat Penegak Hukum Akt. 73	30
Total		270
1	ToT SPPA	90
Total		90

- Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Pada tahun 2022, Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan memiliki anggaran sebesar Rp. 544.120.000,- untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan dan menyusun laporan penyelenggaraan diklat berbasis teknis dan kepemimpinan, serta anggaran sebesar Rp. 341.197.000 untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan dan menyusun laporan penyelenggaraan diklat SPPA bagi aparaturnegak hukum dan instansi teknis lainnya.

2. Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia

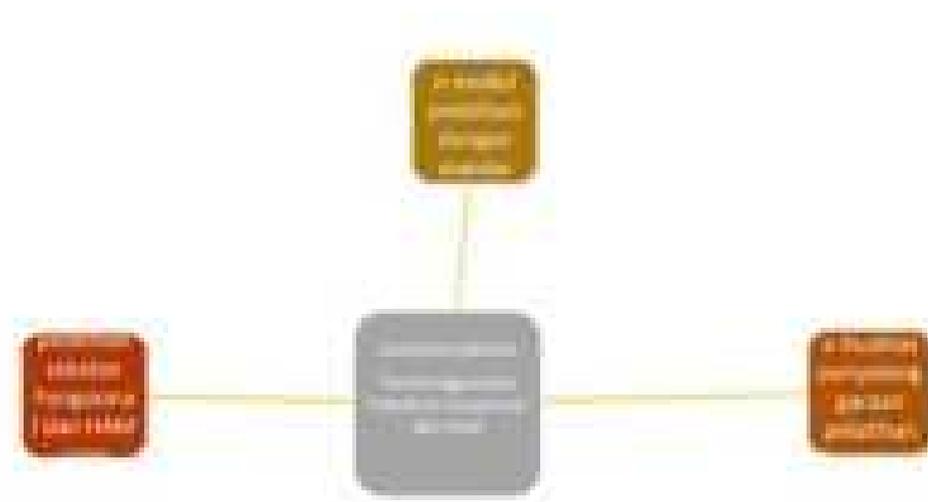
Tugas Pokok dan Fungsi

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pelatihan fungsional dan Hak Asasi Manusia.

Fungsi Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM adalah:

- a) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran di bidang pendidikan dan pelatihan fungsional dan hak asasi manusia;
- b) Penyusunan pedoman dan program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional dan hak asasi manusia;
- c) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional dan hak asasi manusia;
- d) Koordinasi dan pembinaan teknis substantif penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional dan hak asasi manusia;
- e) Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional dan hak asasi manusia;
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha pusat.

Sasaran dan Indikator Kinerja Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM



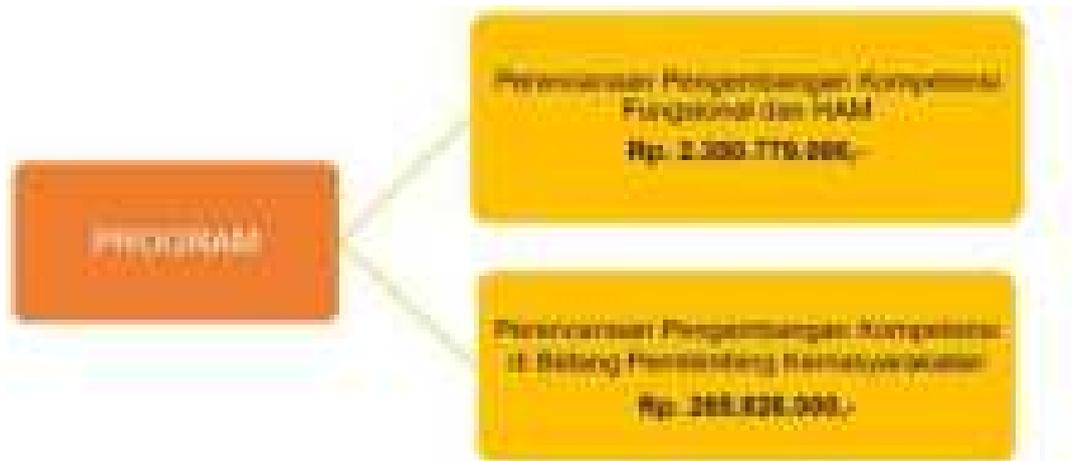
Rencana Kerja

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM pada tahun 2022 menganggarkan sebanyak Rp. 9.964.138.000,- untuk pengembangan diklat

di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Berikut kegiatan Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM Tahun 2022:

- Bidang Program

Program pengembangan diklat fungsional dan HAM mempunyai anggaran sebesar Rp. 2.616.605.000,- yang yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:



- Bidang Penyelenggara

Penyelenggaraan kegiatan pelatihan pada Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua 2 yaitu:

1. Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi di Bidang Fungsional dan HAM

Dengan anggaran sebesar Rp. 5.315.748.000,- ditargetkan pada tahun anggaran 2022 sebanyak 2.771 orang dapat ditingkatkan kompetensi melalui berbagai jenis pelatihan sebagai berikut:

NO	PELATIHAN	TARGET
1	Pelatihan Fungsional Arsiparis TK Keahlian	30
2	Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama	25
3	Pelatihan Dasar-Dasar HAM	720
4	Pelatihan Fungsional Analisis Kepegawaian Keahlian	120

5	Pelatihan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian Pemula	320
6	Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Pertama	41
7	Pelatihan Fungsional Pranata Humas	52
8	Pelatihan Fungsional Analisis Kebijakan	148
9	Pelatihan Fungsional Asesor SDM Aparatur	9
10	Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli	50
11	Pelatihan Fungsional Penjenjangan Auditor Utama	2
12	Pelatihan Fungsional Pembentukan Auditor Ahli Muda	13
13	Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat Pengangkatan Pertama	103
14	Pelatihan ACLS bagi Fungsional Dokter	50
15	Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Level 1	140
16	Pelatihan Fungsional Analisis Hukum	60
17	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	66
18	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Muda	40
19	Pelatihan Fungsional Penguatan Pembimbing Kemasyarakatan	490
20	Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda	30
21	Pelatihan Fungsional Penjenjangan Auditor Madya	9
22	ToT Tenaga Pengajar Pelatihan Fungsional Pemeriksa Kekayaan Intelektual	29
23	ToT Tenaga Pengajar Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum	30
24	ToT Tenaga Pengajar Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan	29
25	Pelatihan Fungsional Pemeriksa Paten	14

26	Pelatihan Fungsional Pemeriksa Merek	17
27	Pelatihan Fungsional Pemeriksa Desain Industri	20
28	ToT Tenaga Pengajar Pelatihan Pemeriksa Keimigrasian	29
29	ToT Tenaga Pengajar Pelatihan Penyuluh Hukum Muda dan Madya	30
30	ToT Tenaga Pengajar Pelatihan Perancang Peraturan Perundang-Undangan	30
31	Pelatihan Fungsional Calon Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Mekanisme PNPB)	25
Total		2.771

2. Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi di Bidang Pembimbing Masyarakat

Anggaran sebesar Rp. 1.418.913.000,- disediakan untuk menghasilkan lulusan pelatihan di bidang Pembimbing Masyarakat sebanyak 320 orang yang terbagi dalam 8 angkatan.

NO	PELATIHAN	TARGET
1	Pelatihan Fungsional Pembimbing Masyarakat Akt. I	40
2	Pelatihan Fungsional Pembimbing Masyarakat Akt. II	40
3	Pelatihan Fungsional Pembimbing Masyarakat Akt. III	40
4	Pelatihan Fungsional Pembimbing Masyarakat Akt. IV	40
5	Pelatihan Fungsional Pembimbing Masyarakat Akt. V	40
6	Pelatihan Fungsional Pembimbing Masyarakat Akt. VI	40
7	Pelatihan Fungsional Pembimbing Masyarakat Akt. VII	40
8	Pelatihan Fungsional Pembimbing Masyarakat Akt. VIII	40
Total		320

- Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Pada tahun 2022, Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM memiliki anggaran sebesar Rp. 131.490.000,- untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan dan menyusun laporan penyelenggaraan diklat berbasis fungsional dan HAM, serta anggaran sebesar Rp. 481.382.000,- untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan dan menyusun laporan penyelenggaraan diklat berbasis pembimbing masyarakat.

3. Pusat Penilaian Kompetensi

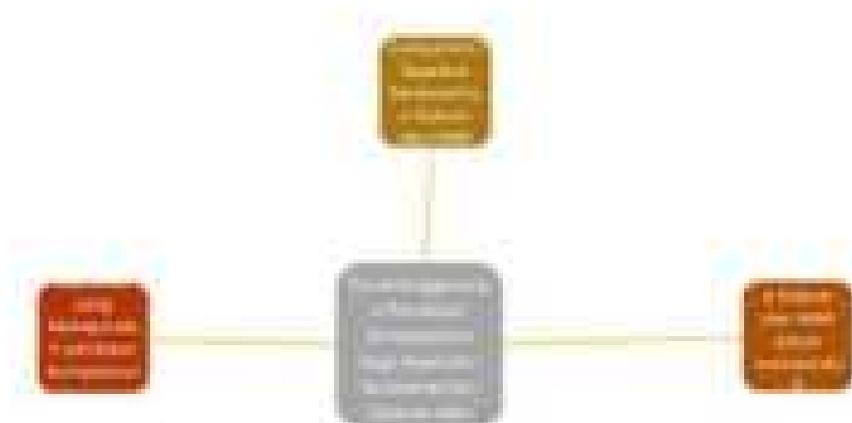
Tugas Pokok dan Fungsi

Pusat Penilaian Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan penilaian kompetensi dan pengelolaan system informasi bidang pengembangan sumber daya manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Fungsi Pusat Penilaian Kompetensi adalah:

- a) Penyiapan penyusunan Kebijakan Teknis, Program dan Anggaran Penilaian Kompetensi;
- b) Penyusunan Standarisasi dan Penilaian Kompetensi;
- c) Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penilaian Kompetensi;
- d) Pengelolaan System Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e) Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Pusat

Sasaran dan Indikator Kinerja Pusat Penilaian Kompetensi



Rencana Kerja

Anggaran sebesar Rp. 2.881.200.000,- diberikan kepada Pusat Penilaian Kompetensi untuk menyelenggarakan kegiatan penilaian kompetensi bagi aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan target terlaksananya penilaian kompetensi terhadap aparatur Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 14.450 orang. Berikut rencana kegiatan Pusat Penilaian Kompetensi pada Tahun 2022:

- Bidang Program

Bidang Program diberikan anggaran sebesar Rp. 800.271.000,- untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan terkait penilaian kompetensi sebagai berikut:



- Bidang Penyelenggaraan

Bidang Penyelenggaraan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.787.871.000,- pada tahun anggaran 2022 merencanakan melaksanakan kegiatan penilaian kompetensi sebagai berikut:



- Bidang Sistem Informasi dan Jaringan

Untuk mendukung penggunaan teknologi informasi dalam pengembangan kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Bidang Sistem Informasi dan Jaringan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 293.058.000,- yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Tata kelola data dan informasi;
- Penyusunan dokumen peta jalan system informasi BPSDM Hukum dan HAM;
- Bimbingan teknis penggunaan MOOC;
- Pemuktahiran data penilaian dan pengembangan kompetensi Kemenkumham

4. Sekretariat Badan

Tugas Pokok dan Fungsi

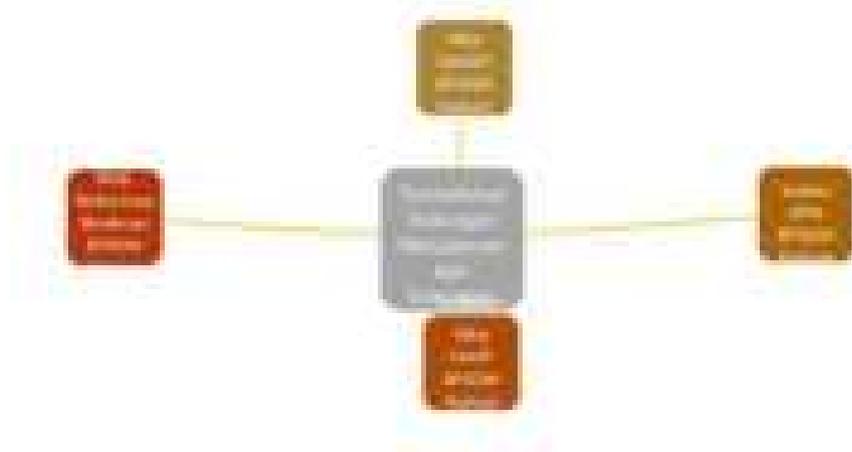
Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM agar pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur hukum dan HAM bisa berjalan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

Fungsi Sekretariat Badan adalah:

- a) Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b) Pelaksanaan urusan administrasi dan kepegawaian;
- c) Pelaksanaan urusan keuangan;

- d) Pengelolaan urusan barang milik negara, hubungan masyarakat dan umum;
- e) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- f) Pelaksanaan dan Koordinasi kerja sama pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- g) Pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia hukum dan Hak Asasi Manusia

Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat Badan



Rencana Kerja

Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM pada Tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp. 75.033.005.000,- untuk mendukung terlaksanannya kegiatan diklat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, berikut rencana kegiatan Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM :

Bagian	Anggaran	Kegiatan
Program dan Pelaporan	Rp. 2.971.471.000,-	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana anggaran tahun 2023 • Supervisi penyusunan RKA-K/L Tahun 2023 • Workshop Akuntabilitas Perencanaan dan Penganggaran di Lingkungan BPSDM Hukum Dan HAM • Workshop Analisa Kebutuhan Anggaran Tahun 2024 • FGD Review Renstra BPSDM 2020-2024 • Refleksi Akhir Tahun TA 2022 • Penyusunan aplikasi E-Report • Workshop Operator E-SOPI

		<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan TA 2022 • Reviu dan Penyusunan SOP BPSDM Hukum dan HAM • Workshop Penyusunan Pedoman Kendali Mutu BPSDM Hukum dan HAM • Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Form Kendali Mutu Pelatihan
Keuangan	Rp. 20.346.514.000,-	<ul style="list-style-type: none"> • Gaji dan Tunjangan • Administrasi Keuangan • Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit • Penguatan Perpajakan • Penyusunan Laporan Keuangan • Rekonsiliasi BPSDM Hukum dan HAM
Kepegawaian	Rp. 1.101.224.000,-	<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Kepegawaian • Penguatan Tata Nilai BerAkhlak bagi seluruh pegawai di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM • Sosialisasi Aplikasi Pengembangan Kompetensi Rumah Belajar • Administrasi Fasilitas RB, SPIP, Pembangunan ZI, WBK, WBBM • Workshop Tunas Integritas BPSDM Hukum dan HAM
Umum	Rp. 50.613.796.000,-	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan BMN • Administrasi Kerja Sama • Layanan Umum • Operasional dan Pemeliharaan Kantor • Pengelolaan Arsip dan Persuratan • Pengelolaan Perpustakaan

5. Politeknik Ilmu Pemasarakatan (POLTEKIP)

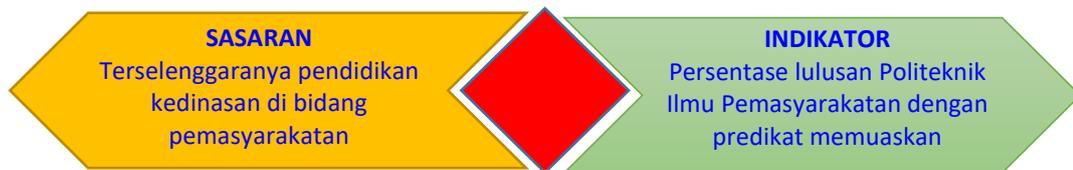
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pemasarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi pada jalur pendidikan program Diploma IV yang ditujukan pada keahlian terapan di bidang Pemasarakatan.

Fungsi Poltekip antara lain:

1. Penyusunan rencana dan program pendidikan;
2. Penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang Pemasarakatan;
3. Pelaksanaan penelitian terapan Pemasarakatan;

4. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
5. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
6. Pelaksanaan pengawasan internal;
7. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
8. Pelaksanaan administrasi umum; dan
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

Sasaran dan Indikator Kinerja Pendidikan Kedinasan POLTEKIP



Rencana Kerja

Politeknik Ilmu Pemyarakatan pada Tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp **43.093.826.000**, dipotong dengan adanya *refocusing* I dan II menjadi Rp.42.817.751.000. Seiring tahun berjalan terdapat blokir (*automatic adjustment*) I dan II dengan total nilai Rp. 2.734.051.000. Pada akhir tahun pagu anggaran menjadi **Rp. 41.024.600.000**. untuk rencana pendidikan kedinasan di bidang Pemyarakatan dengan rincian sebagai berikut :

Rencana Kegiatan POLTEKIP

No	Nama Kegiatan	Pagu
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	9,988,552,000
1	Layanan BMN	830,651,000
2	Layanan Umum	809,010,000
3	Layanan Perkantoran	8,348,891,000
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,538,545,000
1	Layanan Sarana Internal	1,538,545,000
	Layanan Manajemen SDM Internal	29,350,291,000
1	Layanan Manajemen SDM	2,959,603,000
2	Pendidikan Taruna TK I Politeknik Ilmu Pemyarakatan	4,992,519,000
3	Pendidikan Taruna TK II Politeknik Ilmu	6,483,975,000

	Pemasyarakatan	
4	Pendidikan Taruna TK III Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	6,288,417,000
5	Pendidikan Taruna TK IV Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	5,391,947,000
6	Masa Basis Calon Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	3,233,830,000
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	147,212,000
1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2,700,000
2	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	115,832,000
3	Layanan Manajemen Keuangan	28,680,000
	Jumlah	41,024,600,000

6. Politeknik Imigrasi (POLTEKIM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Imigrasi, Politeknik Imigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang Keimigrasian, berikut fungsi Politeknik Imigrasi

Fungsi Politeknik Imigrasi:

1. Penyusunan rencana dan program pendidikan serta bahan ajar;
2. Penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang Keimigrasian;
3. Pelaksanaan penelitian;
4. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
5. Pelaksanaan sistem penjamin mutu dan pengawasan internal;
6. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
7. Pelaksanaan administrasi akademik dan umum;
8. Pengelolaan laboratorium, perpustakaan, sistem informasi dan penerbitan, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya; dan
9. Pelaksanaan kegiatan pelaporan

Sasaran dan Indikator Kinerja Pendidikan Kedinasan POLTEKIM



Rencana Kerja

Politeknik Imigrasi pada Tahun 2022 menganggarkan sebesar Rp.40.811.580.000,- untuk pelaksanaan pendidikan kedinasan di bidang Keimigrasian dengan rincian rencana kegiatan sebagai berikut :

Rencana Kegiatan POLTEKIM

No	Nama Kegiatan	Pagu
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	9,874,499,000
1	Layanan BMN	224,535,000
2	Layanan Umum	295,020,000
3	Layanan Perkantoran	9,354,944,000
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	163,259,000
1	Layanan Sarana Internal	163,259,000
	Layanan Manajemen SDM Internal	29,803,511,000
1	Layanan Manajemen SDM	2,922,256,000
2	Pendidikan Taruna TK I Politeknik Imigrasi	5,458,074,000
3	Pendidikan Taruna TK II Politeknik Imigrasi	6,057,015,000
4	Pendidikan Taruna TK III Politeknik Imigrasi	5,897,421,000
5	Pendidikan Taruna TK IV Politeknik Imigrasi	6,012,317,000
6	Masa Basis Calon Taruna Politeknik Imigrasi	3,456,428,000
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	764,196,000
1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7,350,000
2	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	737,346,000
3	Layanan Manajemen Keuangan	19,500,000
	Jumlah	40,605,465,000

7. Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 04 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Balai Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai

dengan wilayah kerja yang ditentukan. Badiklat Hukum dan HAM yang ada di saat ini adalah :

1. Badiklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau
2. Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah
3. Badiklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara

Wilayah Kerja Balai Diklat Hukum dan HAM

No	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau	Batam, Kepulauan Riau	Provinsi : 1. Aceh 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat 4. Sumatera Selatan 5. Riau 6. Kepulauan Riau 7. Jambi 8. Bangka Belitung
2	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah	Semarang, Jawa Tengah	Provinsi : 1. Jawa Tengah 2. D.I. Yogyakarta 3. Jawa Timur 4. Kalimantan Barat 5. Kalimantan Selatan 6. Kalimantan Tengah 7. Kalimantan Timur 8. Kalimantan Utara 9. Bali 10. Nusa Tenggara Barat 11. Nusa Tenggara Timur
3	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara	Bitung, Sulawesi Utara	Provinsi : 1. Sulawesi Selatan 2. Sulawesi Utara 3. Sulawesi Tengah 4. Sulawesi Tenggara 5. Sulawesi Barat 6. Gorontalo 7. Maluku 8. Maluku Utara 9. Papua 10. Papua Barat

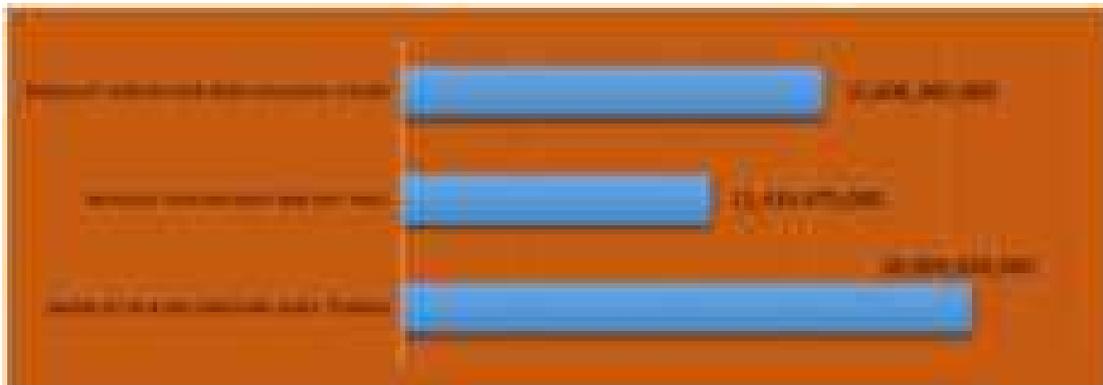
Fungsi Balai Diklat Hukum dan HAM :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sasaran dan Indikator Kinerja Balai Diklat Hukum dan HAM :



Pagu Anggaran Penyelenggaraan Pelatihan di Balai Diklat Hukum dan HAM



Rencana Pelatihan pada Badiklat Hukum dan HAM

NO	BADIKLAT	Target	Ket
1	Kepulauan Riau	2.135	51 Angkatan
2	Sulawesi Utara	1.615	45 Angkatan
3	Jawa Tengah	1.900	34 Angkatan
TOTAL		5.650	130 Angkatan

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa dalam tahun 2022 target pelatihan berjumlah 5.650 orang dengan jumlah 130 angkatan.

D. Rencana Penyerapan Anggaran BPSDM Hukum dan HAM

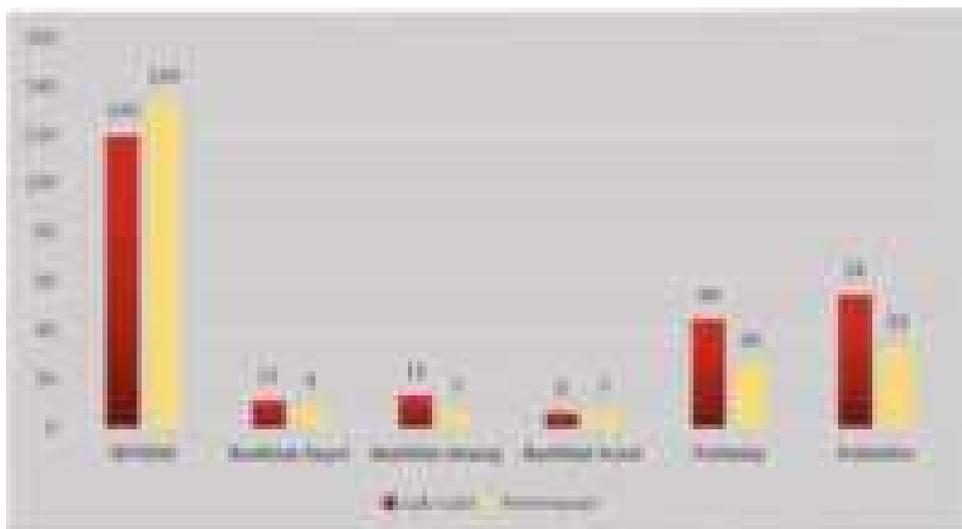
Anggaran BPSDM Hukum dan HAM pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 229.437.166.000,- terbagi ke dalam 9 satuan kerja. Berikut rencana penyerapan anggaran (*Disbursement plan*) BPSDM Hukum dan HAM):

No	Satuan Kerja	Rencana % Penyerapan Anggaran Tahun 2022											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nop	Des
1	Pusbanglat Tekpim dan Kepemimpinan	1%	3%	11%	12%	6%	7%	11%	5%	3%	34%	6%	0%
2	Pusbanglat Fungsional dan HAM	1%	7%	7%	10%	11%	10%	14%	9%	9%	13%	7%	1%
3	Pusat Penilaian Kompetensi	1%	5%	9%	13%	11%	3%	6%	5%	9%	22%	15%	0%
4	Sekretariat	1%	4%	7%	11%	10%	12%	18%	7%	7%	10%	9%	5%
5	Badiklat Jateng	2%	6%	9%	9%	7%	7%	8%	6%	5%	15%	15%	9%
6	Badiklat Kepri	9%	5%	2%	11%	7%	7%	9%	6%	5%	12%	7%	0%
7	Badiklat Sulut	2%	2%	11%	10%	15%	15%	15%	12%	1%	16%	1%	0%
8	Poltekip	1%	3%	12%	13%	6%	5%	6%	7%	7%	7%	17%	15%
9	Poltekim	1%	8%	6%	9%	6%	10%	13%	10%	8%	9%	14%	5%

E. Sumber Daya Manusia BPSDM Hukum dan HAM

BPSDM Hukum dan HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pengembangan SDM didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 464 orang dengan berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan



CAPAIAN KINERJA



BAB III CAPAIAN KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN ANGGARAN 2022

Pada Bab ini akan dijelaskan tentang manifestasi dari pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan serta dapat di pertanggungjawabkan, yang meliputi pencapaian target dan implementasi kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM disertai dengan permasalahan yang dihadapi oleh BPSDM Hukum dan HAM pada Tahun 2022.

A. Capaian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM

Pada tahun anggaran 2022, BPSDM Hukum dan HAM sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah menyelenggarakan berbagai jenis kegiatan pelatihan baik pelatihan teknis, pelatihan kepemimpinan maupun pelatihan fungsional dan HAM dengan output pelatihan sebanyak **115.217 aparatur** di bidang Hukum dan HAM melalui berbagai metode pembelajaran yaitu klasikal (tatap muka langsung), pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan *e-learning*. Selain melakukan kegiatan pengembangan pegawai, BPSDM Hukum dan HAM juga melakukan penilaian dan pemetaan kompetensi kepada 16.268 pegawai.

Disamping menyelenggarakan pengembangan pegawai bagi aparatur di bidang hukum dan hak asasi manusia, BPSDM Hukum dan HAM juga menyelenggarakan Pendidikan Kedinasan yang mencetak SDM yang memiliki kompetensi di bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan. Melalui Politeknik Ilmu Pemasarakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM), BPSDM Hukum dan HAM menyelenggarakan Pendidikan Kedinasan yang mencetak SDM yang memiliki kompetensi di bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan. Jumlah taruna saat ini yang sedang mengikuti pendidikan kedinasan sebanyak adalah 2.223 taruna dengan 1.035 orang merupakan taruna Poltekip dan 1.188 orang merupakan taruna Poltekim.

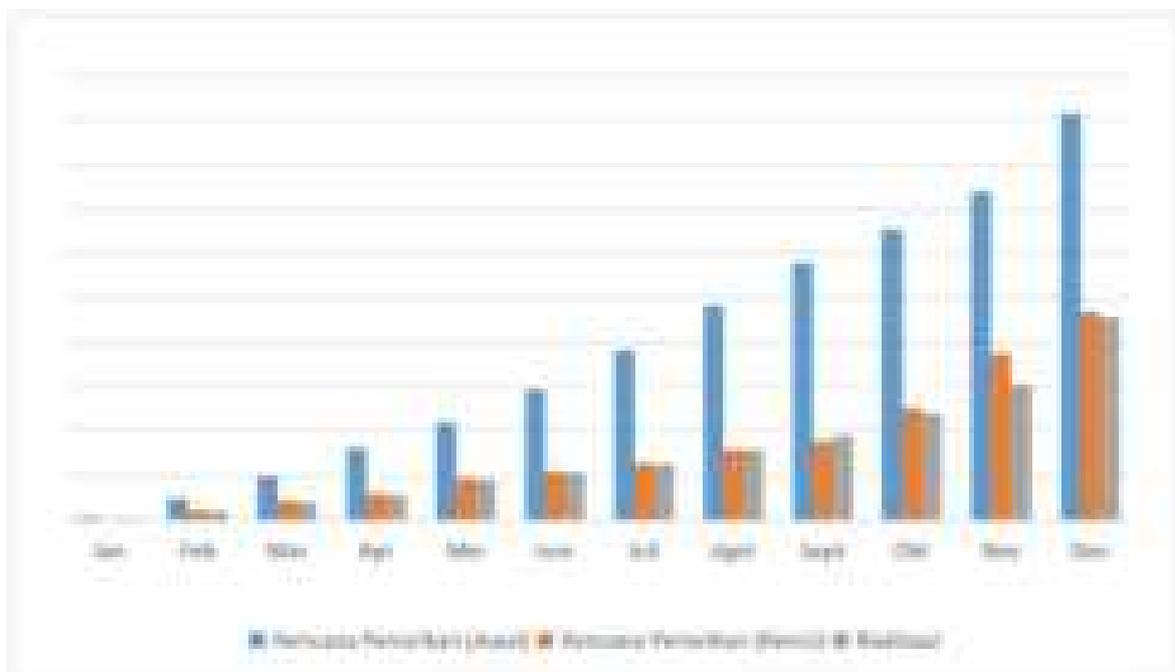
Capaian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM

NO	BAGIAN/SATKER	REALISASI
1	Pusat Pengembangan Pelatihant Fungsional dan HAM	64.173

2	Pusat Penilaian Kompetensi	16.268
3	Pusat Pengembangan Pelatihant Teknis dan Kepemimpinan	39.692
5	POLTEKIM	1.188
6	POLTEKIP	1.305
7	Badiklat Kepulauan Riau	3.062
8	Badiklat Jawa Tengah	5.963
9	Badiklat Sulawesi Utara	2.327
TOTAL		133.978

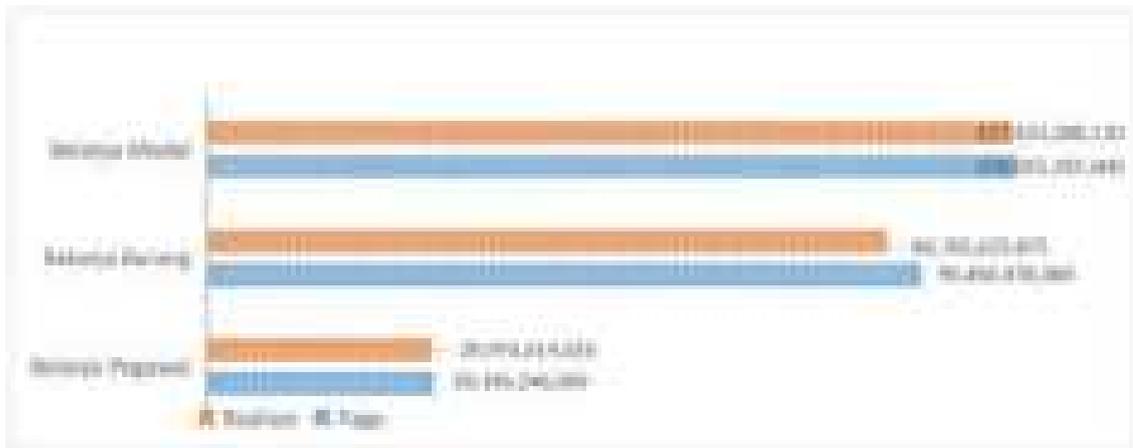
Dari sisi penyerapan anggaran, dari pagu awal anggaran yang diterima BPSDM Hukum dan HAM sebesar **Rp 284.182.140.000,-** berkurang menjadi **Rp 229.437.166.000,-**. Dari anggaran yang diterima tersebut BPSDM Hukum dan HAM berhasil menyerap anggaran sebesar **Rp. 225.210.507.498,-** atau **98,16%**. Dalam masa pandemi covid-19, jumlah penyerapan anggaran yang dilakukan oleh BPSDM Hukum dan HAM termasuk memuaskan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari komitmen para pimpinan dan pelaksana di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM untuk tetap berkinerja maksimal meskipun pada situasi yang tidak mendukung seperti saat ini.

Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran 2022



Sumber : SMART Ditjen Anggaran 28 Januari 2020

Anggaran Belanja BPSDM Hukum dan HAM



Sumber : SMART Ditjen Anggaran 28 Januari 2020

Berdasarkan grafik tentang realisasi anggaran per belanja diketahui bahwa :

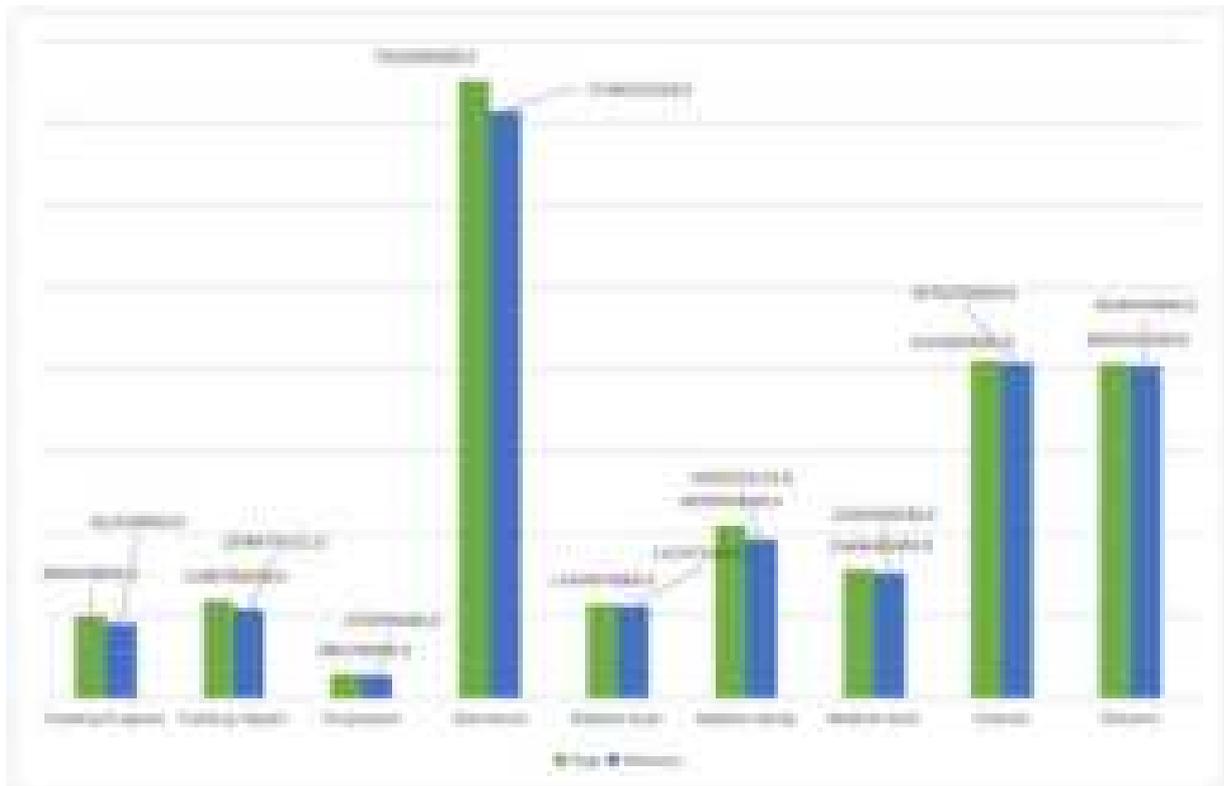
- realisasi belanja pegawai sebesar Rp.29.970.614.033,- atau 98,81% dari pagu anggaran belanja pegawai sebesar Rp.30.330.246.000,-
- realisasi belanja barang sebesar Rp.90.705.625.875,- atau 95,02% dari pagu anggaran belanja barang sebesar Rp.95.456.978.000,-
- realisasi belanja modal sebesar Rp. 107.433.288.110,- atau 99,39% dari pagu anggaran belanja barang sebesar Rp. 108.092.287.000,-

Perbandingan Capaian Penyerapan Anggaran BPSDM Hukum dan HAM 2020-2022



Berdasarkan grafik diatas dapat kita ketahui meskipun dalam situasi pandemi covid-19, BPSDM Hukum dan HAM masih mampu meningkatkan capaian penyerapan anggarannya. Bisa dilihat dari perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya 2020 (97,53%), 2021 (98,8%), penyerapan pada Tahun 2022 mengalami peningkatan realisasi anggaran sebesar 98,16 % dari pagu yang diberikan.

Realisasi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja BPSDM Hukum dan HAM



sumber : spanint.kemenkeu 18 Januari 2023

Berikut capaian kinerja pada satuan kerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM tahun anggaran 2022:

1. Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

- Bidang Program

Bidang Program Pusat Pengembang Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan pada Tahun 2022 melaksanakan beberapa kegiatan penyusunan kurikulum dan modul, serta reakreditasi pelatihan. Kegiatan Bidang Program secara rinci antara lain:

Indikator	Kinerja		Anggaran (Rp)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penyusunan Program Pelatihan Teknis Masyarakat Tahap I	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3.093.233.000	2.999.593.290
Penyusunan Program Pelatihan Teknis Keimigrasian Tahap I	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Persiapan Pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2022	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Akreditasi Latsar dan Diklat Kepemimpinan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Review Modul MTSL	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Review dan Penyempurnaan Instrumen Evaluasi Pelatihan Teknis	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Penyusunan Pedoman Pelatihan Teknis Metode MOOC	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Konsinyering Seleksi Training of Trainer Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Penyusunan Naskah Tema Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II Kemenkumham TA 2023	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Penyusunan Pedoman Evaluasi Pasca Pelatihan SPPA	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Persentase Capaian (%)	100		97	

Berdasarkan tabel diatas, Bidang Program telah melaksanakan 10 kegiatan pada Tahun 2022 yang berarti bahwa kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya sehingga realisasi kegiatan Bidang Program mencapai 100%. Dari sisi anggaran, realisasi Bidang Program mencapai 97% atau sebesar Rp. 2.999.593.290,- dari yang dianggarkan dalam DIPA sebesar Rp. 3.093.233.000,-

- Bidang Penyelenggaraan

Indikator	Kinerja		Anggaran (Rp)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penyelenggaraan Diklat di	30	30	5.496.682.000	5.276.501.987

Bidang Teknis dan Kepemimpinan	Pelatihan	Pelatihan		
Jumlah Lulusan Diklat di Bidang Teknis dan Kepemimpinan	10.427 Orang	7.587 Orang		
Jumlah Lulusan MOOC Reformasi Birokrasi	30.407 Orang	22.955 Orang		
Penyelenggaraan Diklat di Bidang SPPA	9 Pelatihan	9 Pelatihan	2.412.734.000	2.012.704.343
Jumlah Lulusan Diklat di Bidang SPPA	270 Orang	270 Orang		
Total	41.104 Orang	30.812 Orang	7.909.416.000	7.289.206.330
Persentase Capaian (%)	75		92,2	

Berdasarkan tabel diatas, Bidang Penyelenggaraan Pusat Pengembang Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan pada Tahun 2022 menyelenggarakan diklat sebanyak 39 pelatihan dengan menggunakan Anggaran DIPA BPSDM Hukum dan HAM maupun PNBPs BPSDM Hukum dan HAM. Penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan menggunakan metode klasikal, metode *e-learning* maupun dengan metode terbaru yaitu *Massive Open Online Course*(MOOC) tersebut sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga hasil capaian kinerja Bidang Penyelenggaraan di Tahun 2022 mencapai 75% yang berasal dari 30 diklat di Bidang Teknis dan Kepemimpinan dan 9 diklat di Bidang SPPA dengan jumlah lulusan diklat sebanyak 30.812 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. 30.812 orang telah lulus mengikuti diklat berbasis kompetensi di bidang Teknis dan Kepemimpinan;
2. 270 orang telah lulus mengikuti diklat berbasis kompetensi di bidang pelatihan terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparat Penegak Hukum.

Adapun realisasi penyerapan anggaran Bidang Penyelenggaraan diklat pada Tahun 2022 sebesar 92% atau Rp. 7.289.206.330,- dari yang dianggarkan dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2022 sebesar Rp. 7.909.416.000,-. Informasi lebih lengkap tentang capaian output pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:



**Capaian Pelatihan di Bidang Teknis dan Kepemimpinan Metode
Klasikal/PJJ/ Blended Learning**

NO	PELATIHAN	WAKTU PELAKSANAAN	PESERTA	
			TARGET	OUPUT
1	Diklat Berbasis Kompetensi di Bidang SPPA (9 Angkatan)	Februari s.d. November	270	270
2	Pelatihan Dasar CPNS bagi Alumni Poltekip dan Poltekim (13 Angkatan)	April s.d. Agustus	550	492
3	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II	10 Agustus – 2 Desember	60	60
4	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	31 Maret – 21 Juli	40	39
5	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (2 Angakatk)	Maret s.d. Agustus	200	78

6	Pelatihan Tim Assesor PMPRB	7 – 11 Februari	30	30
7	Pendidikan Khusus Keimigrasian bagi Lulusan Program D-IV Poltekim	28 Juni – 11 Juli	126	126
8	Pelatihan Teknik Audit Berbantuan Komputer	7 – 11 Maret	30	30
9	Pelatihan TI Pusdatin	7 Maret – 6 April	18	16
10	ToT Pelatihan Imigrasi (2 Angkatan)	4 – 7 Desember	80	47
11	ToT Pelatihan Pemasyarakatan (2 Angkatan)	7 – 10 Desember	80	41
12	Pelatihan Dasar CPNS (10 Angkatan)	Juni s.d. Oktober	383	394
13	Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) (4 Angkatan)	8 Februari – 10 Maret	160	160
14	Pelatihan Manajemen Resiko	14 – 18 Februari	40	40
15	Pelatihan Teknis Pengelolaan Perpustakaan	21 Maret – 26 April	30	24
16	Pelatihan Layanan Perpustakaan	22 – 30 Maret	30	25
17	Pelatihan Host Online	23 Mei – 1 Juli	120	117
18	Pelatihan Penanganan Pengaduan Masyarakat	23 – 25 Mei	30	28
19	Pelatihan Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Keolahragaan bagi Pegawai Kemenkumham	5 – 7 Oktober	19	19
20	Pendidikan Khusus Keimigrasian (Umum)		300	299
21	ToT SPPA	21 – 25 November	90	92

Total	2.686	2.427
--------------	--------------	--------------

Capaian *Massive Onlie Open Course (MOOC)*

NO	PELATIHAN	PESERTA	
		TARGET	OUPUT
1	MOOC Reformasi Birokrasi	30.407	22.955
Total		30.407	22.955

**Capaian Pelatihan di Bidang Teknis dan Kepemimpinan Metode
*E-Learning***

NO	PELATIHAN	WAKTU	PESERTA	
		PELAKSANAAN	TARGET	OUPUT
1	Pelatihan Petugas Pengamanan Tingkat Dasar (22 Angkatan)	24 Januari – 4 Maret	880	814
2	Pelatihan Petugas Pengamanan Tingkat Lanjutan bagi Petugas Lapas dan Rutan (20 Angkatan)	25 Maret – 30 Mei	800	637
3	Pelatihan Pelayanan Publik Tingkat Dasar (24 Angkatan)	7 – 27 Oktober	1.080	798
4	Pelatihan Pelayanan Publik Tk. Lanjutan (24 Angkatan)	18 – 24 November	931	561
5	Pelatihan Reformasi Birokrasi (22 Angkatan)	4 Februari – 26 Agustus	880	680
6	Pelatihan Administrasi Perkantoran Tk. Dasar (25 Angkatan)	26 Agustus – 30 September	1.000	401
7	Pelatihan Administrasi Perkantoran Tk. Lanjutan (22 Angkatan)	9 September – 7 Oktober	880	478

8	Pelatihan Pemeriksa Pelanggaran Tata Tertib (19 Angkatan)	19 Agustus – 30 September	760	415
9	Pelatihan Pengadministrasian dan Perlengkapan Keamanan (25 Angkatan)	28 Oktober – 25 November	800	646
Total			8.011	5.430

- Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Indikator	Kinerja		Anggaran (Rp)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Evaluasi Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan	57 Laporan	57 Laporan	544.120.000	528.566.544
Evaluasi Pasca Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan	4 Laporan	4 Laporan		
Evaluasi Pelatihan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	341.197.000	297.446.327
Review dan Penyempurnaan Instrumen Pelatihan di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM TA 2022	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Pelatihan SPPA	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Evaluasi Pasca Pelatihan SPPA	1 Laporan	1 Laporan		
Total	62 Laporan	62 Laporan	885.317.000	826.012.871
Persentase Capaian (%)	100		93,3	

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerjanya diperoleh data capaian kinerja Bidang Evaluasi dan Pelaporan adalah sebesar 100 % hasil ini diperoleh dari pembagian antara realisasi dengan target, adapun dari sisi penyerapan anggaran Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada Tahun 2022 telah berhasil melakukan penyerapan anggaran sebesar 93,3% atau Rp. 826.012.871,- dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 885.317.000,-.

2. Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM

- Bidang Program

Bidang Program Pusat Pengembang Pelatihan Fungsional dan HAM pada Tahun 2022 melaksanakan beberapa kegiatan penyusunan kurikulum dan modul, serta workshop. Kegiatan Bidang Program secara rinci antara lain:

Indikator	Kinerja		Anggaran (Rp)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penyusunan Kurikulum Pelatihan Fungsional Penjenjangan Pengaman Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2.616.605.000	2.556.377.232
Penyusunan Modul Pelatihan Fungsional Penjenjangan Pengaman Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Penyusunan Modul Pelatihan Fungsional Penjenjangan Pemeriksa Keimigrasian	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Penyusunan Modul Pelatihan Fungsional Analisis Hukum	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Penyusunan Kurikulum Pelatihan Fungsional Analisis Hukum	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Penyusunan Kurikulum Pelatihan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional dan HAM	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Konsolidasi Pelatihan Fungsional pada 3 (tiga) Balai Diklat	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Finalisasi Penyusunan Modul Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Ahli Pertama	19 Modul	19 Modul		
Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan <i>Massive Online Open Course (MOOC)</i> Dasar-Dasar HAM	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Workshop Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		

Finalisasi Modul Pelatihan Fungsional Pengaman Masyarakat	19 Modul	19 Modul	
Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
Workshop Penyusunan Analisa Kebutuhan Pelatihan TA 2023	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
Penyusunan Pedoman Evaluasi Pasca Pelatihan Pembimbing Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
Persentase Capaian (%)	100	97,7	

Berdasarkan tabel diatas, Bidang Program telah melaksanakan 15 kegiatan pada Tahun 2022 dan menghasilkan 19 modul Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Ahli Pertama serta 19 modul Pelatihan Fungsional Pengaman Masyarakat yang berarti bahwa kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya sehingga realisasi kegiatan Bidang Program mencapai 100%. Dari sisi anggaran, realisasi Bidang Program mencapai 97,7% atau sebesar Rp. 2.556.377.232,- dari yang dianggarkan dalam DIPA sebesar Rp. 2.616.605.000,-



- Bidang Penyelenggaraan

Indikator	Kinerja	Anggaran (Rp)
-----------	---------	---------------

	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penyelenggaraan Diklat di Bidang Fungsional dan HAM	29 Pelatihan	29 Pelatihan		
Jumlah Lulusan Diklat di Bidang Fungsional dan HAM	2.651 Orang	2.463 Orang	5.315.748.000	5.036.553.831
Jumlah Lulusan MOOC Konsep Dasar HAM	61.000 Orang	50.317 Orang		
Penyelenggaraan Diklat di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan	8 Pelatihan	8 Pelatihan	1.418.913.000	1.156.146.419
Jumlah Lulusan Diklat di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan	320 Orang	320 Orang		
Total	63.971 Orang	53.100 Orang	6.734.661.000	6.192.700.250
Persentase Capaian (%)	83		92	

Berdasarkan tabel diatas, Bidang Penyelenggaraan Pusat Pengembang Pelatihan Fungsional dan HAM pada Tahun 2022 menyelenggarakan diklat sebanyak 37 pelatihan dengan menggunakan Anggaran DIPA BPSDM Hukum dan HAM maupun PNPB BPSDM Hukum dan HAM. Penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan menggunakan metode klasikal, metode *e-learning* maupun dengan metode terbaru yaitu *Massive Open Online Course*(MOOC) tersebut sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga hasil capaian kinerja Bidang Penyelenggaraan di Tahun 2022 mencapai 81% yang berasal dari 30 diklat di Bidang Fungsional dan HAM dan 8 diklat di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan dengan jumlah lulusan diklat sebanyak 53.100 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. 52.780 orang telah lulus mengikuti diklat berbasis kompetensi di bidang Fungsional dan HAM;
2. 320 orang telah lulus mengikuti diklat berbasis kompetensi di bidang Pembimbing Kemasyarakatan.

Adapun realisasi penyerapan anggaran Bidang Penyelenggaraan diklat pada Tahun 2022 sebesar 92% atau Rp. 6.192.700.250,- dari yang dianggarkan dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2022 sebesar Rp. 6.734.661.000,-. Informasi lebih lengkap tentang capaian output pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Capaian Pelatihan di Bidang Fungsional dan HAM Metode Klasikal/PJJ/
 Blended Learning**

NO	PELATIHAN	WAKTU PELAKSANAAN	PESERTA	
			TARGET	OUPUT
1	Diklat Berbasis Kompetensi di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan (8 Angkatan)	Mei s.d. November	320	320
2	Pelatihan Fungsional Arsiparis TK Keahlian	1 Agustus – 17 November	30	30
3	Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama	8 Februari – 11 Maret	25	25
4	Pelatihan Fungsional Analisis Kepegawaian Keahlian	Februari s.d. Maret	120	118
5	Pelatihan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian Pemula (8 Angkatan)	Mei s.d. Juli	320	319
6	Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Pertama	Maret s.d. April	41	41
7	Pelatihan Fungsional Pranata Humas (2 Angkatan)	Mei s.d. Juni	52	52
8	Pelatihan Fungsional Analisis Kebijakan	Juli s.d. September	148	142
9	Pelatihan Fungsional Asesor SDM Aparatur	30 Mei – 1 Juli	9	9
10	Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli (2 Angkatan)	Agustus s.d. Oktober	50	50
11	Pelatihan Fungsional Penjenjangan Auditor Utama	5 – 17 September	2	0
12	Pelatihan Fungsional Pembentukan Auditor Ahli Muda	Mei s.d. Agustus	13	10
13	Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat Pengangkatan Pertama (4 Angkatan)	Juli	103	103
14	Pelatihan ACLS bagi Fungsional Dokter (2 Angkatan)	Juli	50	50

15	Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Level 1		Juni s.d. Oktober	140	127
16	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa		Mei s.d. Juni	66	51
17	Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda		25 Oktober – 28 November	30	28
18	Pelatihan Fungsional Penjenjangan Auditor Madya		September s.d. November	9	9
19	ToT Tenaga Pengajar Fungsional Pemeriksa Kekayaan Intelektual		8 – 14 Juni	29	29
20	ToT Tenaga Pengajar Fungsional Penyuluh Hukum		10 – 14 Januari	30	30
21	ToT Tenaga Pengajar Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan		17 – 21 Januari	29	29
22	Pelatihan Fungsional Pemeriksa Paten		5 – 28 Oktober	14	14
23	Pelatihan Fungsional Pemeriksa Merek		12 Oktober – 4 November	17	17
24	ToT Tenaga Pengajar Fungsional Pemeriksa Keimigrasian		7 – 13 April	29	29
25	ToT Tenaga Pengajar Fungsional Penyuluh Hukum Muda dan Madya		15 – 21 Juni	30	30
26	ToT Tenaga Pengajar Fungsional Perancang Perundang-Undangan		28 November – 2 Desember	30	29
27	Pelatihan Fungsional Calon Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Mekanisme PNBP)		23 Agustus – 4 November	25	25
Total				1.761	1.716

Capaian *Massive Onlie Open Course* (MOOC)

NO	PELATIHAN	PESERTA	
		TARGET	OUPUT
1	MOOC Konsep Dasar HAM	61.000	50.317
Total		61.000	50.317

Capaian Pelatihan di Bidang Fungsional dan HAM Metode *E-Learning*

NO	PELATIHAN	PESERTA		
		TARGET	OUPUT	
1	Pelatihan Dasar-Dasar HAM (16 Angkatan)	Januari s.d. September	720	632
2	Pelatihan Fungsional Penguatan Pembimbing Kemasyarakatan (12 Angkatan)	Maret s.d. November	490	435
Total			1.210	1.067

- Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Indikator	Kinerja		Anggaran (Rp)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Evaluasi Pelatihan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	131.490.000	120.805.600
Pelaporan Pelatihan Fungsional dan HAM	29 Laporan	29 Laporan		
Evaluasi Pelatihan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	481.382.000	406.761.500
Evaluasi Pasca Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan	1 Laporan	1 Laporan		
Total	30 Laporan	30 Laporan	612.872.000	527.567.100
Persentase Capaian (%)	100		86,1	

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerjanya diperoleh data capaian kinerja Bidang Evaluasi dan Pelaporan adalah sebesar 100 % hasil ini diperoleh dari pembagian antara realisasi dengan target, adapun dari sisi penyerapan anggaran Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada Tahun 2022 telah berhasil melakukan penyerapan anggaran sebesar 86,1% atau Rp. 527.567.100,- dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 612.872.000,-.

3. Pusat Penilaian Kompetensi

- Bidang Program

Bidang Program Pusat Penilaian Kompetensi pada Tahun 2022 melaksanakan beberapa kegiatan. Kegiatan Bidang Program secara rinci antara lain:

Indikator	Kinerja		Anggaran (Rp)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Peningkatan Kapasitas bagi Calon Assessor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	800.271.000	777.328.997
Workshop Peningkatan Kapasitas Assessor Dalam Penulisan Karya Tulis Ilmiah	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Penyusunan Tes Potensi Tahap 4	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Penyusunan Instrumen Penilaian Kompetensi Analisis Keimigrasian Pemeriksa Keimigrasian	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Studi Banding Assessment Center	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Evaluasi dan Pelaporan Penilaian Kompetensi	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Persentase Capaian (%)	100		97,1	

Berdasarkan tabel diatas, Bidang Program telah melaksanakan 7 kegiatan pada Tahun 2022 yang berarti bahwa kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya sehingga realisasi kegiatan Bidang Program mencapai 100%. Dari sisi anggaran, realisasi Bidang Program mencapai

97,1% atau sebesar Rp. 777.328.997,- dari yang dianggarkan dalam DIPA sebesar Rp. 800.271.000,-

- Bidang Penyelenggara

Kegiatan	Kinerja		Anggaran (Rp)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	807	743	1.787.871.000	1.759.696.970
Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	515	302		
Penilaian Preferensi Kompetensi dengan Metode Online	13.975	11.893		
Total	15.297	12.938		
Persentase Capaian (%)	84,6		98,4	

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Bidang Penyelenggaraan pada tahun 2022 telah melaksanakan uji kompetensi kepada 12.938 Aparatur Kementerian Hukum dan HAM. Jumlah tersebut kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu 15.297 orang. Hal ini disebabkan karena sejumlah peserta penilaian kompetensi metode online tidak mengikuti kegiatan. Adapun realisasi penyerapan anggaran bidang penyelenggaraan penilaian kompetensi pada tahun 2022 sebesar 98,4% atau Rp. 1.759.696.970,- dari yang dianggarkan dalam DIPA BPSDM hukum dan HAM sebesar Rp. 1.787.871.000,-



**Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Administrasi di Lingkungan
 Kementerian Hukum dan HAM**

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	PESERTA	
			TARGET	OUPUT
1	Penilaian Kompetensi Kanwil Sumatera Barat	16 – 18 Maret	60	60
2	Penilaian Kompetensi Kanwil Bengkulu	16 – 18 Maret	60	60
3	Penilaian Kompetensi Kanwil Sulawesi Tengah	17 – 21 Mei	60	60
4	Penilaian Kompetensi Kanwil Bangka Belitung	28 – 29 Juni	60	60
5	Penilaian Kompetensi Kanwil Jawa Barat	17 – 21 Mei	60	60
6	Penilaian Kompetensi Kanwil Jawa Timur	21 – 22 Juni	60	60
7	Penilaian Kompetensi Kanwil Papua Barat	7 – 11 Februari	60	60
8	Penilaian Kompetensi Kanwil Sulawesi Utara	28 November – 1 Desember	80	60
9	Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang JF Analis Keimigrasian, Pemeriksa Keimigrasian, dan Pengangkatan JF Analis Keimigrasian & Penilaian Kompetensi di Lingkungan Ditjen Imigrasi (Pemetaan)	19 – 22 Juli	76	62
10	Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Administrasi di Lingkungan Badiklat JAwa Tengah	11 – 13 Juli	16	15

11	Penilaian Kompetensi Bagi Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Banten – Administrator	9 – 11 Agustus	11	11
12	Penilaian Kompetensi dan Potensi Bagi Administrator dalam Rangka Manajemen Talenta di Lingkungan Kemenkumham	12 – 21 Oktober	88	88
13	Penilaian Kompetensi pada Pelaksanaan Pindah Instansi ke Dalam Kemenkumham TA 2022	3 – 4 November	112	83
14	Penilaian Kompetensi bagi Pegawai di Lingkungan Ditjen Imigrasi dan BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2022	5 September	4	4
Total			807	743

**Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM**

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	PESERTA	
			TARGET	OUPUT
1	Penilaian Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Auditor di Lingkungan Itjen	18 – 20 Januari	102	90
2	Penilaian Kompetensi Penyesuaian/Inpasing JF Kurator Keperdataan di 3 (Tiga) Wilayah di Lingkungan Ditjen AHU	26 – 28 Januari	15	15
3	Penilaian Kompetensi Pengangkatan dalam JF Analis Keimigrasian Ahli Utama dan Analis Hukum Ahli Utama	7 – 8 Maret	2	2
4	Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Bagi Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek, dan Pemeriksa Desain Industri di Lingkungan	24 – 25 Maret	36	27

	Ditjen KI			
5	Penilaian Kompetensi Perpindahan Jab. Fungsional Widyaiswara Utama dan Analis Hukum Utama	12 -13 Mei	2	2
6	Penilaian Kompetensi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara BPSDM Hukum dan HAM	24 Juni	2	2
7	Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang JF Analis Keimigrasian, Pemeriksa Keimigrasian, dan Pengangkatan JF Analis Keimigrasian & Penilaian Kompetensi di Lingkungan Ditjen Imigrasi (Pemetaan)	19 – 22 Juli	67	30
8	Penilaian Kompetensi dan Potensi Bagi JF Ahli Madya Dalam Rangka Manajemen Talenta di Lingkungan Kemenkumham	12 – 21 Oktober	255	110
9	Penilaian Kompetensi Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama Pembimbing Kemasyarakatan	15 November	3	3
10	Penilaian Kompetensi Auditor Ahli Utama di Lingkungan Itjen	11 – 12 Juli	1	1
11	Penilaian Kompetensi Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Melalui Perpindahan Jabatan ke Jenjang Ahli Utama	14 – 15 September	1	1
12	Penilaian Kompetensi bagi Pegawai di Lingkungan Ditjen Imigrasi dan BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2022	5 September	1	1
13	Penilaian Kompetensi Bagi Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Banten – JF Ahli Madya	9 – 11 Agustus	17	7

14	Penilaian Kompetensi bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara di Lingkungan Kemenkumham	20 Desember	9	9
15	Penilaian Kompetensi bagi Jabatan Fungsional Perancang dan Penyuluh Hukum Ahli Utama di Lingkungan Kemenkumham	21 Desember	2	2
Total			515	302

Penilaian Preferensi Kompetensi dengan Metode Online

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	PESERTA	
			TARGET	OUTPUT
1	Penilaian Preferensi Gelombang I	8 – 11 Maret	3.000	2.774
2	Penilaian Preferensi Gelombang II	2 – 3 Juni 24 – 25 Juni	3.300	2.503
3	Penilaian Preferensi Gelombang III	22 – 30 September	3.500	2.645
4	Penilaian Preferensi Gelombang IV	26 – 27 Desember	3.750	3.595
5	Inpassing Analisis Hukum (SJT & CBT) (Non DIPA BPSDM Hukum dan HAM)	23 Maret	425	376
Total			13.975	11.893

Selain menyelenggarakan penilaian kompetensi, bidang penyelenggara Pusat Penilaian Kompetensi melakukan pengumpulan *feedback* penilaian kompetensi sebagai evaluasi terhadap penilaian kompetensi yang telah dilakukan. Pengumpulan *feedback* penilaian kompetensi dilakukan di lingkungan Kanwil Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Papua Barat, dan Bangka Belitung

- Bidang Sistem Informasi dan Jaringan

Kegiatan	Kinerja		Anggaran (Rp)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penyusunan Dokumen Peta Jalan Sistem Informasi BPSDM Hukum dan HAM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	293.058.000	285.602.000
Bimbingan Teknis Penggunaan MOOC	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Pemutakhiran Data Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Kemenkumham	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Persentase Capaian (%)	100		97,5	

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang Sistem Informasi dan jaringan pada tahun 2022 melaksanakan 3 kegiatan yang menjadi target pada Bidang Sistem dan Informasi yang telah ditetapkan sehingga dari data tersebut diperoleh hasil capaian kinerja Bidang Sistem Informasi dan Jaringan sebesar 100%. Adapun realisasi penyerapan anggaran Bidang Sistem Informasi dan Jaringan pada tahun 2022 sebesar 97,5% atau Rp. 285.602.000,- dari yang dianggarkan dalam DIPA BPSDM hukum dan HAM sebesar Rp. 293.058.000,-

4. Sekretariat Badan

Capaian kinerja bagian Sekretariat pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Sasaran Kinerja:				
Terselenggaranya dukungan administrasi dan fasilitatif di lingkungan BPSDM				
No	Bagian	Indikator Kinerja	Realisasi	% capaian
1	Program dan Pelaporan	Supervisi Penyusunan RKA-K/L Tahun 2023	Terlaksananya supervisi penyusunan RKA-K/L Tahun 2023	100
		Workshop Akuntabilitas Perencanaan dan Penganggaran	Terlaksananya Workshop Akuntabilitas Perencanaan dan	100

	Lingkungan BPSDM Hukum dan HAM	Penganggaran di Lingkungan BPSDM Hukum dan HAM	
	Workshop Analisa Kebutuhan Anggaran Tahun 2024	Terlaksananya Workshop Analisa Kebutuhan Anggaran Tahun 2024	100
	Administrasi Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya LKjIP BPSDM 2021, LKjIP Sekretariat 2021, Laporan Tahunan BPSDM 2021	100
	Penyusunan Aplikasi E-Report	Tersusunnya Aplikasi E-Report	100
	FGD Review Renstra BPSDM 2020-2024	Terlaksananya FGD Review Renstra BPSDM 2020-2024	100
	Refleksi Akhir Tahun TA 2022	Terlaksananya Refleksi Akhir Tahun TA 2022	100
	Workshop Operator ESOP	Terlaksananya Workshop Operator ESOP	100
	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Tahun Anggaran 2022	Terlaksananya Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Tahun Anggaran 2022	100
	Reviu dan Penyusunan SOP BPSDM Hukum dan HAM	Terlaksananya Reviu dan Penyusunan SOP BPSDM Hukum dan HAM	100
	Workshop Penyusunan Pedoman Kendali Mutu BPSDM Hukum dan HAM	Terlaksananya Workshop Penyusunan Pedoman Kendali Mutu BPSDM Hukum dan HAM	100
	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Form Kendali Mutu Pelatihan	Terlaksananya Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Form Kendali Mutu Pelatihan	100
2	Kepegawaian Adminsitration Pengelolaan Kepegawaian	Terselenggaranya Layanan kepegawaian BPSDM	100

	Hukum dan HAM	
Pembinaan Mental, Fisik dan Disiplin Pegawai	Pembinaan Rohani dan Jasmani bagi Pegawai BPSDM Hukum dan HAM	100
Pengembangan Mandiri Pegawai	Terselenggaranya kegiatan pengembangan mandiri bagi pegawai BPSDM Hukum dan HAM	100
Administrasi Fasilitas Reformasi Birokrasi, Spip, Pembangunan ZI, WBK dan WBBM	Terselenggaranya layanan administrasi fasilitas RB, SPIP, ZI, WBK dan WBM di lingkungan BPSDM	100
Pencetakan Publikasi Pembangunan ZI	Tersedianya spanduk, poster, roller banner dalam rangka publikasi pembangunan ZI	100
Administrasi Jabatan Fungsional Dan Pemberhentian	Terselenggaranya layanan administrasi jabatan fungsional dan pemberhentian di lingkungan BPSDM	100
Penguatan Tata Nilai BerAkhlaq bagi Seluruh Pegawai di Lingkungan BPSDM Hukum dan HAM	Terselenggaranya Penguatan Tata Nilai BerAkhlaq bagi Seluruh Pegawai di Lingkungan BPSDM Hukum dan HAM	100
Sosialisasi Aplikasi Pengembangan Kompetensi Rumah Belajar	Terselenggaranya Sosialisasi Aplikasi Pengembangan Kompetensi Rumah Belajar	100
Workshop Tunas Integritas BPSDM Hukum dan HAM	Terselenggaranya Workshop Tunas Integritas BPSDM Hukum dan HAM	100
Administrasi 10 Jabatan Fungsional di Lingkungan BPSDM Hukum dan HAM	Terselenggaranya Administrasi 10 Jabatan Fungsional di Lingkungan BPSDM	100

			Hukum dan HAM	
3	Keuangan	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Terselenggaranya kegiatan : 1. Administrasi Pelaksanaan Anggaran, 2. Rekonsiliasi Keuangan 3. Penyusunan Laporan Keuangan di BPSDM Hukum dan HAM 4. Penguatan Perpajakan 5. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit	100
		Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya 1. Gaji dan Tunjangan untuk PNS dan PPNPN BPSDM 2. Uang lembur PNS BPSDM	100
4	Umum	Pengelolaan Administrasi dan Umum BMN	Terselenggaranya kegiatan: 1. Administrasi BMN dan Umum 2. Pengelolaan ULP 3. Administrasi Humas dan Protokol 4. Administrasi Tata Usaha 5. Administrasi Perpustakaan 6. Pemenuhan Perlengkapan Asrama Dan Flat 7. Penanganan Covid-19 8. Kebutuhan ATK dan Obat-Obatan	100
		Pengadaan kendaraan bermotor	Tersedianya kendaraan operasional BPSDM untuk dan	100

	Politeknik (Tangerang)	
Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Tersedianya perangkat pengolah data dan komunikasi untuk BPSDM dan Politeknik (Tangerang)	100
Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Tersedianya peralatan fasilitas perkantoran untuk BPSDM dan Politeknik (Tangerang)	100
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Terselenggaranya kegiatan: 1. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4, 6 2. Perawatan Kendaraan Roda 2 3. Layanan Daya Dan Jasa 4. Perawatan Gedung Kantor 5. Penunjang Sarana Dan Prasarana Kegiatan Perkantoran 6. Pengelolaan Administrasi Perkantoran 7. Pengiriman Jasa Pos Dan Giro 8. Keprotokolan 9. Poliklinik Dan Obat-Obatan 10. Fumigasi Ruang Perpustakaan Dan Fogging Gedung 11. Sewa Mesin Fotocopy 12. Perawatan Inventaris Kantor 13. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Dan PPNPN	100

- 14. Sewa Kendaraan Dan Operasionalnya
- 15. Belanja Komunikasi
- 16. Penanganan Covid-19

Realisasi Anggaran

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM tahun 2022 sebesar Rp. 73.808.430.958,- atau 98,4% dari Rp. 75.033.005.000,-. Berikut rincian penyerapan anggaran per Bagian di Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM:

Realisasi Anggaran Bagian Program dan Pelaporan

No	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Perencanaan dan Penganggaran	286.065.000	282.402.332	98,7
2	Pemantauan dan Evaluasi	1.597.910.000	1.553.219.928	97,2
3	Pengelolaan Kelembagaan	1.087.496.000	1.085.963.830	99,9
JUMLAH		2.971.471.000	2.921.586.090	98,3

Realisasi Anggaran Bagian Kepegawaian

No	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Administrasi Kepegawaian	387.804.000	318.721.200	82,2
2	Pembinaan Kepegawaian	446.689.000	338.988.880	75,9
3	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	266.731.000	251.520.100	94,3
JUMLAH		1.101.224.000	909.230.180	82,6

Realisasi Anggaran Bagian Keuangan

No	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Gaji dan Tunjangan	19.999.188.000	19.972.602.908	99,9
2	Administrasi Keuangan	347.326.000	341.870.380	98,4
JUMLAH		20.346.514.000	20.314.473.288	99,8

Realisasi Anggaran Bagian Umum

No	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Pengelolaan BMN	1.173.423.000	999.698.319	85,2
2	Penyediaan Informasi Publik	655.199.000	595.656.658	90,9
3	Layanan Umum	1.038.650.000	917.262.624	88,3
4	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	37.850.046.000	37.424.277.775	98,9
5	Sarana dan Prasarana BPSDM	9.488.675.000	9.392.506.604	99
6	Penyelenggaraan Kearsipan	407.803.000	333.739.420	81,8
JUMLAH		50.613.796.000	49.663.141.400	98,1

Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Berikut capaian nilai IKPA BPSDM Tahun 2020-2022:



Untuk tahun anggaran 2022 nilai IKPA BPSDM Hukum dan HAM mengalami kenaikan dari nilai IKPA tahun 2021 dengan nilai IKPA pada tahun 2022 sebesar 94,40. Hal ini mengindikasikan adanya kenaikan kinerja pelaksanaan anggaran di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM. Walaupun dengan adanya kebijakan pemerintah yaitu *Automatic Adjustment*, kinerja pelaksanaan anggaran berupa perubahan anggaran, perencanaan anggaran dan kegiatan dalam tahun berjalan tetap berjalan sesuai dengan perencanaan.



Penilaian Sistem Monitoring Evaluasi Terpadu (SMART)

SMART merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang dibangun oleh Kementerian Keuangan guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Berdasarkan Rencana Strategis BPSDM Hukum dan HAM 2020-2024, telah ditetapkan target nilai SMART untuk tahun 2022 sebesar 95. Berikut capaian nilai SMART BPSDM Hukum dan HAM tahun 2020-2022:



Dari grafik di atas bisa dilihat nilai SMART pada BPSDM Hukum dan HAM mengalami kenaikan dari 95,13 pada 2021 menjadi 96,95 pada 2022, ini artinya bahwa terjadi peningkatan kualitas pelaksanaan program belanja di BPSDM pada 2022. Disamping itu, nilai SMART yang diperoleh telah melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra BPSDM Hukum dan HAM 2020-2024.

Penilaian SAKIP BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2022

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap institusi pemerintah diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berikut capaian nilai SAKIP BPSDM Tahun 2020-2022:



Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BPSDM Hukum dan HAM Perubahan 2020-2024, target penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPSDM Hukum dan HAM adalah memperoleh predikat BB (Sangat Baik). Dari grafik diatas dapat diketahui untuk tahun 2022 BPSDM Hukum dan HAM memperoleh nilai SAKIP sebesar 80,6 dengan predikat A (Memuaskan). Sehingga bisa disimpulkan, nilai SAKIP yang diperoleh BPSDM Hukum dan HAM sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra BPSDM Hukum dan HAM 2020-2024.

Penilaian Reformasi Birokrasi BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2022

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2022 telah melaksanakan program reformasi birokrasi yang mencakup 9 (sembilan) program terkait 8 (delapan) area perubahan, yakni manajemen

perubahan, penataan peraturan perundangundangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan ketatalaksanaan, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sesuai dengan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022. Nilai Reformasi Birokrasi BPSDM Hukum dan HAM merupakan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga nilai Reformasi Birokrasi BPSDM Hukum dan HAM tahun 2022 menunggu proses penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian yang dilaksanakan di bulan Maret Tahun 2023.

**Rencana Kerja dan Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Tahun 2022**

TRIWULAN I

Area	Rencana Kerja 2022	Data Dukung	Capaian
Manajemen Perubahan	• Pembentukan Tim RB BPSDM Hukum dan HAM	Dokumen SK	100%
	• Internalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tentang program-program percepatan Reformasi Birokrasi (RKT)	Laporan	
	• Internalisasi Tata Nilai PASTI "berAKHLAK"	Laporan	
	• Pembentukan Agen Perubahan BPSDM Hukum dan HAM	Dokumen SK	
	• Inventarisasi daftar proyek perubahan pegawai	Dokumen Rekapitulasi	
	• Pemanfaatan Teknologi dalam Pekerjaan Sehari-hari	Dokumen Capture	
Penataan dan Penguatan Organisasi	• Pembentukan Tim Evaluasi Kelembagaan	Dokumen SK	100%
Penataan Tatalaksana	• Pembentukan Tim Tata Kelola SPBE	Dokumen SK	0%
	• Pembentukan Tim Pelaksana Alih Media Arsip BPSDM Hukum dan HAM	Dokumen SK	
	• Pelaksanaan implementasi Alih Media Arsip Manual dengan jra berketerangan permanen	Laporan	0%
	• Pembentukan Tim pengawasan kearsipan BPSDM Hukum dan HAM	Dokumen SK	75%
	• Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik	Laporan	100%
Penataan Manajemen	• Pengukuran kinerja individu secara berkala setiap bulan	Dokumen Pengukuran	100%

Area	Rencana Kerja 2022	Data Dukung	Capaian
Sumber Daya Manusia dan Aparatur Sipil Negara		Kinerja Individu	
	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi dan Tindak Lanjut Implementasi Peningkatan Disiplin Pegawai 	Laporan	100%
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Coaching and Mentoring terkait capaian kinerja secara berkala 	Laporan	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Penyajian LAKIP Tahun 2021 	Laporan	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja 	Laporan	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Publikasi DIPA dan pelaporan kinerja pada website dan media sosial 	Dokumentasi	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran 	Laporan	100%
Penguatan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan SK Satgas Penyelenggaraan SPIP 	Dokumen SK	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Rekomendasi SPIP dari Itjen Tahun 2021 	Laporan	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan SPIP secara berkala 	Laporan	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan SK Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 	Dokumen SK	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Rekomendasi Manajemen Risiko dari Itjen Tahun 2021 	Laporan	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Rencana Aksi Hasil Rekomendasi Itjen Tahun 2021 	Laporan	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Hasil Rekomendasi Itjen Tahun 2021 	Laporan	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Manajemen Risiko 	Laporan dan Dokumen	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Coaching and Mentoring/Sosialisasi Penerapan Manajemen Risiko 	Laporan	100%
	<ul style="list-style-type: none"> SK Tim Benturan Kepentingan 	Dokumen	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi dan Tindak Lanjut Benturan Kepentingan 	Laporan	100%
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> Publikasi hasil survey Kepuasan Masyarakat 	Dokumentasi	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Kampanye Publik dengan Pembuatan Bahan-Bahan Informasi 	Laporan	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian Tindak Lanjut Lapor 	Laporan	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan Publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan terjangkau 	Dokumen	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan Sistem Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan 	Dokumen SK	100%

TRIWULAN II

Area	Rencana Kerja 2022	Data Dukung	Capaian
Manajemen Perubahan	• Melakukan Kegiatan Revolusi Mental (Kegiatan Kerohanian, <i>Capacity Building</i>)	Laporan dan Dokumen Rapat	100%
	• Pelatihan Asesor PMPRB Unit Pusat	Laporan dan Dokumen Rapat	100%
	• Internalisasi Tata Nilai PASTI "berAKHLAK"	Laporan	100%
	• Pemetaan Proyek Perubahan yang Telah Terimplementasi	Dokumen Rekapitulasi	100%
	• Pemanfaatan Teknologi dalam Pekerjaan Sehari-hari	Dokumen <i>Capture</i>	100%
Deregulasi Kebijakan	• Melaksanakan Analisis dan Evaluasi atas Kebijakan yang Diterapkan	Laporan Rekomendasi	50%
Penataan dan Penguatan Organisasi	• Melakukan Survey kepada Responden (Unit Eselon I)	Dokumen Rekapitulasi Hasil Survey Responden Kelembagaan	100%
Penataan Tatalaksana	• Implementasi E-Government yang Selaras dengan <i>Grand Design</i> IT Kemenkumham	<i>Capture</i> Aplikasi Layanan SPBE	100%
	• Pelaksanaan implementasi Alih Media Arsip Manual dengan jra berketerangan permanen	Laporan	100%
	• Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik	Laporan	100%
Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Aparatur Sipil Negara	• Pengukuran kinerja individu secara berkala setiap bulan	Dokumen Pengukuran Kinerja Individu	100%
	• Evaluasi dan Tindak Lanjut Implementasi Peningkatan Disiplin Pegawai	Laporan	100%
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	• <i>Coaching and Mentoring</i> terkait capaian kinerja secara berkala	Laporan	100%
	• Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja	Laporan	100%
	• Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja	Laporan	100%
	• Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran	Laporan dan Dokumen Rapat	100%
	• Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Monev Realisasi Anggaran	Laporan dan	100%

Area	Rencana Kerja 2022	Data Dukung	Capaian
		Dokumen Rapat	
Penguatan Pengawasan	• Sosialisasi Rencana Aksi Hasil Rekomendasi Itjen Tahun 2021 SPIP	Laporan dan Dokumen Rapat	0%
	• Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan SPIP secara berkala	Laporan dan Dokumen Rapat	100%
	• Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi	Laporan dan Dokumen Rapat	100%
	• Laporan Perolehan PNPB	Laporan	100%
	• Laporan Pelaksanaan Pengelolaan BMN (Rumah Negara, Tanah Negara, Kendaraan Bermotor)	Laporan	80%
	• Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Dokumen Usulan Satuan Kerja	100%
	• Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Hasil Rekomendasi Itjen Tahun 2021	Laporan	100%
	• Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Manajemen Risiko	Laporan	100%
	• Pemantauan atas Penanganan Risiko	Laporan	100%
	• Sosialisasi Benturan Kepentingan	Laporan dan Dokumen Rapat	100%
	• Evaluasi dan Tindak Lanjut Benturan Kepentingan	Laporan dan Dokumen Rapat	100%
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	• Sosialisasi/Publikasi 6 Komponen <i>Service Delivery</i> dalam Dokumen Standar Pelayanan	Dokumen dan <i>Capture</i>
• Publikasi Maklumat Pelayanan		<i>Capture</i>	100%
• Publikasi hasil survey Kepuasan Masyarakat		Dokumentasi	100%
• Pelaksanaan Kampanye Publik dengan Pembuatan Bahan-Bahan Informasi		Laporan	100%
• Pengelolaan Pelayanan Publik		Laporan	100%
• Penyelesaian Tindak Lanjut Lapor		Laporan	100%
• Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik		Laporan	100%
• Inovasi Pelayanan Publik		Dokumentasi dan Laporan	100%

TRIWULAN III

Area	Rencana Kerja 2022	Data Dukung	Capaian
Manajemen Perubahan	• Internalisasi Tata Nilai PASTI "berAKHLAK"	Laporan	100%
	• Progress Pelaksanaan Proyek Perubahan yang Telah Terimplementasi (50- 100 %)	Dokumen Rekapitulasi	100%
Penataan dan Penguatan Organisasi	• Inventarisasi Hasil Survey Evaluasi Kelembagaan	Dokumen Rekapitulasi Hasil Survey Responden Kelembagaan	100%
Penataan Tatalaksana	• Pelaksanaan implementasi Alih Media Arsip Manual dengan jra berketerangan permanen	Laporan	100%
	• Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik	Laporan	100%
	• Pengembangan Proses Bisnis Instansi dan Unit	Dokumen Probis Level 2 SOP Makro	100%
	• Evaluasi Standar Operasi Prosedur	Laporan	100%
Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Aparatur Sipil Negara	• Pengukuran kinerja individu secara berkala setiap bulan	Dokumen Pengukuran Kinerja Individu	100%
	• Evaluasi dan Tindak Lanjut Implementasi Peningkatan Disiplin Pegawai	Laporan	100%
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	• <i>Coaching and Mentoring</i> terkait capaian kinerja secara berkala	Laporan	100%
	• Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja	Laporan	100%
	• Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran	Laporan dan Dokumen Rapat	100%
	• Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Monev Realisasi Anggaran	Laporan dan Dokumen Rapat	100%
Penguatan Pengawasan	• Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan SPIP secara berkala	Laporan dan Dokumen Rapat	90%
	• Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi	Laporan dan Dokumen Rapat	90%
	• Pelaksanaan Tindak Lanjut Atas Temuan dan Rekomendasi Reviu Tim Pemeriksa Internal (Pemeriksaan Keuangan)	Laporan	100%

Area	Rencana Kerja 2022	Data Dukung	Capaian
	• Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Hasil Rekomendasi Itjen Tahun 2021 (MR)	Laporan	90%
	• Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Manajemen Risiko	Laporan	90%
	• Evaluasi dan Tindak Lanjut Benturan Kepentingan	Laporan dan Dokumen Rapat	90%
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	• Publikasi hasil survey Kepuasan Masyarakat	Dokumentasi	100%
	• Pelaksanaan Kampanye Publik dengan Pembuatan Bahan-Bahan Informasi	Laporan	100%
	• Penyelesaian Tindak Lanjut Lapor	Laporan	100%

TRIWULAN IV

Area	Rencana Kerja 2022	Data Dukung	Capaian
Manajemen Perubahan	• <i>Benchlearning</i> (saling belajar dan tukar pengalaman) Untuk Perbaikan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM	Laporan Kegiatan	100%
	• Melakukan Kegiatan Revolusi Mental	Laporan Kegiatan	100%
	• Internalisasi Tata Nilai PASTI BerAKHLAK	Laporan Kegiatan	100%
	• Pemanfaatan Teknologi dalam Pekerjaan Sehari-hari	<i>Capture</i> Pemanfaatan	100%
Deregulasi Kebijakan	• Identifikasi dan Pemetaan Regulasi/Peraturan Perundangan Undangan	Laporan	0%
	• Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri	Dokumen Usulan	100%
	• Melaksanakan Analisis dan Evaluasi atas Kebijakan yang Diterapkan	Laporan	0%
	• Menyusun Laporan Hasil Evaluasi Dampak Penerapan Kebijakan	Laporan	0%
Penataan dan Penguatan Organisasi	• Analisis Data Hasil Survey Evaluasi Kelembagaan	Laporan Evaluasi Kelembagaan	100%
Penataan Tatalaksana	• Implementasi <i>E-Government</i> yang Selaras dengan <i>Grand Design</i> IT Kementerian Hukum dan HAM	<i>Capture</i> aplikasi Layanan SPBE	100%
	• Pelaksanaan implementasi Alih Media Arsip Manual dengan jra berketerangan permanen	Laporan	100%
	• Sosialisasi Permenkumham tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi	Laporan Sosialisasi	100%
	• Evaluasi Pelaksanaan Permenkumham tentang Standar Layanan Informasi	Laporan Evaluasi	0%

Area	Rencana Kerja 2022	Data Dukung	Capaian
	Publik dan Klasifikasi Informasi		
	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik 	Laporan	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SOP 	Laporan Tindak Lanjut	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi dan Penyelarasan Probis Lv 2 Unit Utama dan SOP Unit Utama 	Laporan	100%
Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Aparatur Sipil Negara	<ul style="list-style-type: none"> Analisis Kebutuhan Pegawai Kemenkumham 	Dokumen Usulan	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Pengukuran kinerja individu secara berkala setiap bulan 	Dokumen Pengukuran Kinerja Individu	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi dan Tindak Lanjut Implementasi Peningkatan Disiplin Pegawai 	Laporan	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Asesor Internal dan Pengelola <i>Assessment Centre</i> (AC) 	Laporan	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Fungsi <i>Assessment Centre</i> 	Laporan Evaluasi	100%
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <i>Coaching and Mentoring</i> terkait capaian kinerja secara berkala 	Laporan	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Temuan dan Rekomendasi Reviu Tim Pemeriksa Internal (Evaluasi SAKIP 2021) 	Laporan	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja 	Laporan	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja 	Laporan Tindak Lanjut	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran 	Laporan dan Dokumen Rapat	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Monev Realisasi Anggaran 	Laporan dan Dokumen Rapat	100%
Penguatan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan SPIP secara berkala 	Laporan dan Dokumen Rapat	100%
	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi 	Laporan dan Dokumen Rapat	90%
	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Perolehan PNPB 	Laporan	90%
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK 	Laporan	90%
	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pelaksanaan Pengelolaan BMN (Rumah Negara, Tanah Negara, dan Kendaraan Bermotor) 	Laporan	100%

Area	Rencana Kerja 2022	Data Dukung	Capaian
	• Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Hasil Rekomendasi Itjen Tahun 2021 (MR)	Laporan	100%
	• Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Manajemen Risiko	Laporan	90%
	• Pemantauan Atas Penanganan Risiko	Laporan	90%
	• Evaluasi dan Tindak Lanjut Benturan Kepentingan	Laporan dan Dokumen Rapat	90%
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	• Publikasi hasil survey Kepuasan Masyarakat	Dokumentasi	90%
	• Pelaksanaan Kampanye Publik dengan Pembuatan Bahan-Bahan Informasi	Laporan	100%
	• Pengelolaan Pelayanan Publik	Laporan	100%
	• Penyelesaian Tindak Lanjut Lapor	Laporan	100%
	• Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Laporan	100%
	• Inovasi Pelayanan Publik	Laporan	100%

5. Politeknik Ilmu Pemasarakatan (POLTEKIP)

- Akademik

Politeknik Ilmu Pemasarakatan mempunyai 3 program pendidikan yaitu Bimbingan Kemasyarakatan, Manajemen Pemasarakatan dan Teknik Pemasarakatan dengan komposisi taruan setiap program studi sebagai berikut:

Komposisi Taruna POLTEKIP

NO	ANGKATAN/ TINGKAT	PROGRAM DIPLOMA			TOTAL
		Bimbingan Kemasyarakatan	Manajemen Pemasarakatan	Teknik Pemasarakatan	
1	Tingkat I (angkatan 56)	102	114	134	350
2	Tingkat II (angkatan 55)	108	103	135	346
3	Tingkat III (angkatan 54)	97	95	117	309
4	Tingkat IV	91	100	109	300

(angkatan 53)				
TOTAL	398 Taruna	412 Taruna	495 Taruna	1.305 Taruna

Berikut jumlah Taruna Politeknik Ilmu Pemasaryakatan pada Tahun 2022:



Jumlah Taruna POLTEKIP 2022

Tahun 2022 terdapat 4 (ermpat) tingkatan yang melangsungkan pendidikan sebagai taruna POLTEKIP, dimana dari tabel diatas dapat dilihat terdapat total 1.305 Taruna pada poltekip. Dari total tersebut, sebanyak 26,81% merupakan taruna Tingkat I, 26,51% dari total tersebut merupakan taruna Tingkat II, 23,67% dari total tersebut merupakan taruna Tingkat III dan 22,98% dari total tersebut merupakan taruna Tingkat IV.

Pada masa pandemi covid-19 yang terjadi pada Tahun 2022. Poltekip menerapkan kegiatan Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan (Jarlatsuh) taruna dengan menggunakan metode jarak jauh. Kegiatan jarlatsuh sudah dilaksanakan dalam kelas virtual dengan berbagai jenis aplikasi (Zoom dan edlink) dan praktek luar kelas, tugas dan ujian dilakukan memanfaatkan aplikasi online seperti *classroom*, *quizz*, *edmono*, dll sesuai kebutuhan dosen. Sebagai metode pembelajaran yang baru, metode ini memiliki kelebihan sebagai berikut: waktu lebih fleksibel, dapat dilakukan dari berbagai tempat, pilihan aplikasi pembantu pelaksanaan perkuliahan lebih banyak, tingkat kehadiran dosen lebih tinggi dan taruna menjadi lebih aktif dan mandiri. Namun, masih terdapat kekurangan dan kendala dalam pelaksanaannya antara lain: kurangnya interaksi langsung antara dosen dan taruna sehingga sebagian taruna tidak bisa terpantau dengan baik ketika perkuliahan, kecenderung mengabaikan aspek akademik (dosen lebih banyak memberikan tugas dari

pada tatap muka online) saat proses pembelajaran, kegiatan yang bersifat praktek terbatas pelaksanaannya, jaringan internet yang kurang mendukung, plagiarisme saat mengerjakan tugas dan ujian tertulis, serta kurangnya interaksi dalam kelas.



- Ketarunaan

Taruna Politeknik Ilmu Pemasaran banyak mengikuti perlombaan maupun kejuaraan di berbagai bidang. Berikut ini adalah prestasi yang berhasil dicapai oleh para taruna Poltekip.

Prestasi Taruna/Taruni Politeknik Ilmu Pemasaran

No	Nama	Prestasi	Lomba	Tingkat
1	Rahmat Putra Diyanto (Tk. IV)	Lomba Menulis Puisi Masuk 100 Besar Urutan Ke-85	Literasi Pedia	NASIONAL
2	Alisya Salsabila (Tk. II)	Juara II menembak AA I PSC Kategori Ladies Bupati Cup Ogan Ilir	Bupati Ogan Ilir	KABUPATEN
3	Muhammad Ridwan	Juara 1 Liga Futsal Antar UPT Se-Lampung	Rutan Kota Agung	PROVINSI

4	Rama Fatahilah Yulianto	Opini "Munculnya Penjara Pribadi di Indonesia, Neo Slavery?"	Times Indonesia (Media Online Nasional)	NASIONAL
5	Alisyia Salsabila (Tk. II)	Juara III Kejurnas Menembak Kasau Cup	TNI Angkatan Udara	NASIONAL
6	Wisnu Lintang Priaji (Tk. IV)	Juara III Pertandingan Pencak Silat Walikota Jakarta Timur	Walikota Jakarta Timur	NASIONAL
7	Muzaki Ismiraj (Tk. II)	Juara III Tenis Lapangan Rektor Cup 2022	Universitas Bengkulu	NASIONAL
8	Rizki Kurniawan (Tk. IV)	Juara I PKM-Kewirausahaan Pekan Ilmiah Perguruan Tinggi Kedinasan Tahun 2022	PKN STAN	NASIONAL
9	Akbar Faris Rama Huna (Tk. III)	Juara I PKM-Kewirausahaan Pekan Ilmiah Perguruan Tinggi Kedinasan Tahun 2022	PKN STAN	NASIONAL
10	Muhammad Idris Ramadhan (Tk. III)	Juara I PKM-Kewirausahaan Pekan Ilmiah Perguruan Tinggi Kedinasan Tahun 2022	PKN STAN	NASIONAL
11	I Putu Bayu Rama Mahendra (Tk. II)	Juara I PKM-Kewirausahaan Pekan Ilmiah Perguruan Tinggi Kedinasan Tahun 2022	PKN STAN	NASIONAL
12	Nur Aprilia Savitri (Tk. I)	Juara I PKM-Kewirausahaan Pekan Ilmiah Perguruan Tinggi Kedinasan Tahun 2022	PKN STAN	NASIONAL
13	Dhika Banu Nugroho (Tk. I)	Juara II Scrabbel Pekan Ilmiah Perguruan Tinggi Kedinasan Tahun 2022	PKN STAN	NASIONAL
14	Reza Agselya Sari (Tk. II)	Juara 1 Kumite U-61 kg Putra	PKN-STAN	NASIONAL
15	Tigor Joshua Samuel Tambunan (Tk. III)	Juara 1 Kumite U-61 kg Putra	PKN-STAN	NASIONAL
16	Rifky Ananda Tarigan (Tk. III)	Juara 3 Kumite U-75 kg Putra	PKN-STAN	NASIONAL
17	Syuradj Wahid Abdi Muzamil (Tk. III)	Juara 2 Kata Perorangan Putra	PKN-STAN	NASIONAL
18	Martial Tedi Marlissa (Tk. III)	Juara 2 Catur Tunggal Putra	PKN-STAN	NASIONAL
19	Harsyah Awalludin Ramadhan (Tk. III)	Juara 2 Kyorugi U-74 putra	PKN-STAN	NASIONAL
20	Melchi Paul Scholten (Tk. III)	Juara 2 Kyorugi U-74 putra	PKN-STAN	NASIONAL
21	Maulvi Achmad Firzansyah (Tk. III)	Juara 2 Sepakbola Putra	PKN-STAN	NASIONAL
22	Gading Wisnu Murti (Tk. III)	Juara 2 Sepakbola Putra	PKN-STAN	NASIONAL

23	Syaerozi Ahmad (Tk III)	Juara 2 Sepakbola Putra	PKN-STAN	NASIONAL
24	Muhamad Fajar Azis (Tk III)	Juara 2 Sepakbola Putra	PKN-STAN	NASIONAL
25	Luthfie Al Fayed Shami razie (Tk III)	Juara 2 Sepakbola Putra	PKN-STAN	NASIONAL
26	Deden Andrian	Juara 2 Sepakbola Putra	PKN-STAN	NASIONAL
27	Andhika Galih Darma Saputra (Tk III)	Juara 2 Sepakbola Putra	PKN-STAN	NASIONAL
28	Dicki Jhosep Sinaga (Tk III)	Juara 2 Sepakbola Putra	PKN-STAN	NASIONAL
29	Martial Tedi Marlissa (Tk III)	Juara 2 Sepakbola Putra	PKN-STAN	NASIONAL
30	Sunu Ariasmara (Tk III)	Juara 2 Sepakbola Putra	PKN-STAN	NASIONAL
31	Muhammad Ridhwan Maulana (Tk III)	Juara 2 Sepakbola Putra	PKN-STAN	NASIONAL
32	Faris Abiyu Ramadhan (Tk II)	Juara 2 Kumite +75 kg Putra	PKN-STAN	NASIONAL
33	M Enrico Giralda Harsari (Tk II)	Juara 3 Badminton Tunggal Putra	PKN-STAN	NASIONAL
34	Muzaki Ismiraj (Tk II)	Juara 3 ganda putra Tennis lapangan	PKN-STAN	NASIONAL
35	Zada aryaguna (Tk II)	Juara 3 Ganda putra Tennis lapangan	PKN-STAN	NASIONAL
36	Mohamad Rizal (Tk II)	Juara 1 Pencak Silat Kategori Tanding Kelas D Putra	PKN-STAN	NASIONAL
37	Pramudya Ananti (Tk II)	Juara 3 Pencak Silat Kategori Tanding Kelas A Putri	PKN-STAN	NASIONAL
38	Nindiarti Septya Ningsih Sudiro (Tk II)	Juara 1 800m Putri	PKN-STAN	NASIONAL
39	Nindiarti Septya Ningsih Sudiro (Tk II)	Juara 1 Estafet 4x100m Putri	PKN-STAN	NASIONAL
40	Shisilia Adela (Tk II)	Juara 1 Estafet 4x100m Putri	PKN-STAN	NASIONAL
41	Jenita Leoni Puspitasari (Tk II)	Juara 1 Kyorugi U-62 putri	PKN-STAN	NASIONAL
42	Jenita Leoni Puspitasari (Tk II)	Juara 3 Poomsae tunggal putri	PKN-STAN	NASIONAL
43	Dinda Valentine Christina Heipon (Tk II)	Juara 2 Kyorugi U-59 putri	PKN-STAN	NASIONAL
44	Gelora Kurniawan Tarigan (Tk II)	Juara 3 Kyorugi U-64 putra	PKN-STAN	NASIONAL
45	Rizqi Ridho Atmadja (Tk II)	Juara 3 Kyorugi U-68 putra	PKN-STAN	NASIONAL
46	Muhammad Maryadi (Tk II)	Juara 2 Sepakbola Putra	PKN-STAN	NASIONAL
47	Fatkhul Hafidh (Tk II)	Juara 2 Sepakbola Putra	PKN-STAN	NASIONAL
48	Ricky Dwi Prastiyo (Tk I)	Juara 2 Sepakbola Putra	PKN-STAN	NASIONAL

49	Zaki Difa Taqiyuddin (Tk II)	Juara 2 Sepakbola Putra	PKN-STAN	NASIONAL
50	Herlambang Prasista Adiyatma (Tk II)	Juara 2 Sepakbola Putra	PKN-STAN	NASIONAL
51	Nani Wondiwoi (Tk II)	Juara 2 Sepakbola Putra	PKN-STAN	NASIONAL
52	Akbar Anugrah Fantono (Tk II)	Juara 2 Sepakbola Putra	PKN-STAN	NASIONAL
53	Lugina (Tk II)	Juara 2 Sepakbola Putra	PKN-STAN	NASIONAL
54	Rizky Surya Baskara (Tk I)	Juara 1 Kumite +75 kg Putra	PKN-STAN	NASIONAL
55	Wanda Azizah Ainur Rizqi (Tk I)	Juara 1 Estafet 4x100m Putri	PKN-STAN	NASIONAL
56	Maharani Cahyaning Utami (Tk I)	Juara 1 Estafet 4x100m Putri	PKN-STAN	NASIONAL
57	Maharani Cahyaning Utami (Tk I)	Juara 2 100M Putri	PKN-STAN	NASIONAL
58	Aura Syahira Nugroho (Tk I)	Juara 2 Lomba Cover Mars Fokri 2022	PKN-STAN	NASIONAL

- Layanan Perkantoran

Politeknik Ilmu Pemasarakatan dalam menjalankan kegiatannya didukung dengan layanan perkantoran yang menunjang kegiatan sehari-hari, berikut rincian anggaran Politeknik Ilmu Pemasarakatan (Poltekip):

Tabel Anggaran Politeknik Pemasarakatan

No	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	9,988,552,000	9,933,470,856	99,4%
1	Layanan BMN	830,651,000	828,052,902	99,6%
2	Layanan Umum	809,010,000	790,684,000	97,7%
3	Layanan Perkantoran	8,348,891,000	8,314,733,954	99,5%
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,538,545,000	1,537,103,000	99,9%
1	Layanan Sarana Internal	1,538,545,000	1,537,103,000	99,9%
	Layanan Manajemen SDM Internal	29,350,291,000	29,283,196,981	99,7%
1	Layanan Manajemen SDM	2,959,603,000	2,924,917,988	98,8%
2	Pendidikan Taruna TK I Politeknik Ilmu Pemasarakatan	4,992,519,000	4,976,067,500	99,6%
3	Pendidikan Taruna TK II Politeknik Ilmu Pemasarakatan	6,483,975,000	6,480,033,500	99,9%
4	Pendidikan Taruna TK III Politeknik Ilmu Pemasarakatan	6,288,417,000	6,282,391,000	99,9%

5	Pendidikan Taruna TK IV Politeknik Ilmu Pemasarakatan	5,391,947,000	5,386,116,993	99,8%
6	Masa Basis Calon Taruna Politeknik Ilmu Pemasarakatan	3,233,830,000	3,233,670,000	99,9%
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	147,212,000	114,130,700	77,5%
1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2,700,000	2,700,000	100%
2	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	115,832,000	91,690,700	79%
3	Layanan Manajemen Keuangan	28,680,000	19,740,000	68,8%
	Jumlah	41,024,600,000	40,867,901,537	99,6%

Dari sisi anggaran capaian Polteknik Ilmu Pemasarakatan (Poltekip) pada tahun 2022 menyerap anggaran sebanyak Rp. **40.867.901.537,-** (99,6%) dari pagu anggaran yang telah ditargetkan sebesar Rp. **41.024.600.000,-**

6. Politeknik Imigrasi (POLTEKIM)

- Akademik

Politeknik Imigrasi mempunyai 3 program pendidikan antara lain Hukum Keimigrasian, Admin Keimigrasian dan Manajemen Teknologi Keimigrasian dengan jumlah taruna masing-masing program studi sebagai berikut:

Komposisi Taruna POLTEKIM

NO	TINGKAT (ANGKATAN)	PROGRAM DIPLOMA			TOTAL ANKATAN
		HUKUM KEIMIGRASIAN	ADMIN KEIMIGRASIAN	MANAJEMEN TEKNOLOGI KEIMIGRASIAN	
1	Tingkat I (Angkatan 24)	117	115	68	300
2	Tingkat II (Angkatan 23)	118	112	66	296
3	Tingkat III (Angkatan 22)	167	89	44	300
4	Tingkat IV (Angkatan 21)	151	106	35	292
	TOTAL	553 Taruna	422 Taruna	213 Taruna	1.188 Taruna

Politeknik Ilmu Keimigrasian (POLTEKIM), untuk tahun 2022 terdapat 1.188 (seribu seratus delapan puluh delapan) taruna yang menjalani pendidikan. Dimana 25,2% dari total tersebut merupakan taruna Tingkat I, 24,9% merupakan taruna tingkat II, 25,2% merupakan taruna tingkat III dan 24,5% merupakan taruna tingkat IV. Dari total taruna tersebut dapat dilihat dari program diploma yang dijalani yang terbagi menjadi tiga program diploma yaitu Hukum Keimigrasian, Administrasi Keimigrasian dan Manajemen Teknologi Keimigrasian. Untuk Program Diploma Hukum Keimigrasian terdapat 46,5%% taruna dari total tersebut, untuk Program Diploma Administrasi Keimigrasian terdapat 35,5%% taruna dari total taruna tersebut dan untuk Program Diploma Manajemen Teknologi Keimigrasian terdapat 17,9%% taruna dari total taruna yang ada di POLTEKIM. Adapun jumlah dosen yang mengajar di Politeknik Imigrasi sebanyak 31 dosen dengan kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.

Sama halnya dengan Poltekip dalam hal proses pengajaran di masa pandemi, Poltekim juga menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh memanfaatkan teknologi informasi seperti aplikasi *Whatsapp*, *Google Meet*, *Zoom* dan aplikasi daring lainnya. Selain memanfaatkan aplikasi-aplikasi tersebut, Poltekim juga menerapkan pola yang berbeda yaitu jadwal pelatihan dari hari Senin-Jumat menjadi Senin-Sabtu, dimana pada hari Sabtu taruna tetap masuk untuk mengikuti materi tambahan serta setiap hari jumat taruna menerima siraman rohani dari masing pemuka agama yang dianut.

Namun keadaan seperti saat ini menimbulkan persepsi diantara taruna bahwa bagaimanapun hasil pembelajaran taruna pasti akan diluluskan sehingga taruna tidak serius dalam mengikuti setiap kegiatan yang dijadwalkan oleh dosen dan pembina. Serta pembina tidak bisa maksimal mengawasi dan memantau taruna dalam setiap kegiatan. Kendala yang sering dialami dalam metode ini antara lain jaringan internet sebagai pendukung utama metode ini. Disamping itu taruna harus mengeluarkan biaya transport dari tempat tinggal taruna ke UPT terdekat. Ditambah lagi apabila UPT harus di-*lockdown*, maka pelaksanaan pembelajaran tidak berjalan dengan maksimal.



- Ketarunaan

Taruna Politeknik Imigrasi banyak mengikuti perlombaan maupun kejuaraan di berbagai bidang berikut ini adalah prestasi yang berhasil di capai oleh para taruna Poltekim:

Prestasi Taruna Poltekim Tahun 2022

NO	NAMA	NAMA PRESTASI (PENYELENGGARA)	TANGGAL LOMBA	TINGKAT
1	Rahmat Putra Diyanto (Tk. IV)	Lomba Menulis Puisi Masuk 100 Besar Urutan Ke-85	26 – 28 Januari	NASIONAL
2	Alisya Salsabila (Tk. II)	Juara II menembak AA IPS C Kategori Ladies Bupati Cup Ogan Ilir	9 Januari	KABUPATEN
3	Muhammad Ridwan	Juara 1 Liga Futsal Antar UPT Se-Lampung	11 Februari	PROVINSI
4	Rama Fatahilah Yulianto	Opini – “Munculnya Penjara Pribadi di Indonesia, Neo Silavery?”	02 Maret	NASIONAL
5	Alisya Salsabila (Tk. II)	Juara III Kejurnas Menembak Kasau Cup	16 – 22 Mei	NASIONAL
6	Wisnu Lintang Priaji (Tk. I V)	Juara III Pertandingan Pencak Silat Walikota Jakarta Timur	27 – 29 Mei	NASIONAL

7	Muzaki Ismiraj (Tk. II)	Juara III Tenis Lapangan Rektor Cup 2022	25 Mei – 15 Juni	NASIONAL
8	Rizki Kurniawan (Tk. IV)	Juara I PKM-Kewirausahaan Pekan Ilmiah Perguruan Tinggi Kedinasan Tahun 2022	22 – 25 Juni	NASIONAL
9	Akbar Faris Rama Hunafa (Tk. III)	Juara I PKM-Kewirausahaan Pekan Ilmiah Perguruan Tinggi Kedinasan Tahun 2022	22 – 25 Juni	NASIONAL
10	Muhammad Idris Ramadhan (Tk. III)	Juara I PKM-Kewirausahaan Pekan Ilmiah Perguruan Tinggi Kedinasan Tahun 2022	22 – 25 Juni	NASIONAL
11	I Putu Bayu Rama Mahendra (Tk. II)	Juara I PKM-Kewirausahaan Pekan Ilmiah Perguruan Tinggi Kedinasan Tahun 2022	22 – 25 Juni	NASIONAL
12	Nur Aprilia Savitri (Tk. I)	Juara I PKM-Kewirausahaan Pekan Ilmiah Perguruan Tinggi Kedinasan Tahun 2022	22 – 25 Juni	NASIONAL
13	Dhika Banu Nugroho (Tk. I)	Juara II Scrabbel Pekan Ilmiah Perguruan Tinggi Kedinasan Tahun 2022	22 – 25 Juni	NASIONAL
14	Reza Agselya Sari (Tk III)	Juara 1 Kumite U-61 kg Putra	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
15	Tigor Joshua Samuel Tambunan (Tk III)	Juara 1 Kumite U-61 kg Putra	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
16	Rifky Ananda Tarigan (Tk III)	Juara 3 Kumite U-75 kg Putra	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
17	Syuradj Wahid Abdi Muza mil (Tk III)	Juara 2 Kata Perorangan Putra	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
18	Martial Tedi Marlissa (Tk I II)	Juara 2 Catur Tunggal Putra	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
19	Harsyah Awalludin Ramadhan (Tk III)	Juara 2 Kyorugi U-74 putra	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
20	Melchi Paul Scholten (Tk III)	Juara 2 Kyorugi U-74 putra	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
21	Maulvi Achmad Firzansah (Tk III)	Juara 2 Sepakbola Putra	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
22	Gading Wisnu Murti (Tk II I)	Juara 2 Sepakbola Putra	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
23	Syaerozi Ahmad (Tk III)	Juara 2 Sepakbola Putra	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
24	Muhamad Fajar Azis (Tk I II)	Juara 2 Sepakbola Putra	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
25	Luthfie Al Fayed Shamirazie (Tk III)	Juara 2 Sepakbola Putra	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
26	Deden Andrian	Juara 2 Sepakbola Putra	21-26 Agustus 2022	NASIONAL

27	Andhika Galih Darma Sa putra (Tk III)	Juara 2 Sepakbola Putra	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
28	Dicki Jhosep Sinaga (Tk I II)	Juara 2 Sepakbola Putra	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
29	Martial Tedi Marlissa (Tk III)	Juara 2 Sepakbola Putra	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
30	Sunu Ariasmara (Tk III)	Juara 2 Sepakbola Putra	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
31	Muhammad Ridhwan Maulana (Tk III)	Juara 2 Sepakbola Putra	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
32	Faris Abiyyu Ramadhan (Tk II)	Juara 2 Kumite +75 kg Putra	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
33	M Enrico Giralda Harsari (Tk II)	Juara 3 Badminton Tunggal Putra	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
34	Muzaki Ismiraj (Tk II)	Juara 3 ganda putra Tennis lapangan	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
35	Zada aryaguna (Tk II)	Juara 3 Ganda putra Tennis lapangan	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
36	Mohamad Rizal (Tk II)	Juara 1 Pencak Silat Kategori Tanding Kelas D Putra	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
37	Pramudya Ananti (Tk II)	Juara 3 Pencak Silat Kategori Tanding Kelas A Putri	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
38	Nindiarti Septya Ningsih Sudiro (Tk II)	PKN-STAN	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
39	Nindiarti Septya Ningsih Sudiro (Tk II)	PKN-STAN	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
40	Shisilia Adela (Tk II)	PKN-STAN	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
41	Jenita Leoni Puspitasari (Tk II)	PKN-STAN	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
42	Jenita Leoni Puspitasari (Tk II)	PKN-STAN	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
43	Dinda Valentine Christina Heipon (Tk II)	PKN-STAN	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
44	Gelora Kurniawan Tarigan (Tk II)	PKN-STAN	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
45	Rizqi Ridho Atmadja (Tk I I)	PKN-STAN	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
46	Muhammad Maryadi (Tk I I)	PKN-STAN	21-26 Agustus 2022	NASIONAL

47	Fatkul Hafidh (Tk II)	PKN-STAN	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
48	Ricky Dwi Prastiyo (Tk II)	PKN-STAN	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
49	Zaki Difa Taqiyuddin (Tk I)	PKN-STAN	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
50	Herlambang Prasista Adiyatma (Tk II)	PKN-STAN	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
51	Nani Wondiwoi (Tk II)	PKN-STAN	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
52	Akbar Anugrah Fantono (Tk II)	PKN-STAN	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
53	Lugina (Tk II)	PKN-STAN	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
54	Rizky Surya Baskara (Tk I)	PKN-STAN	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
55	Wanda Azizah Ainur Rizqi (Tk I)	PKN-STAN	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
56	Maharani Cahyaning Utami (Tk I)	PKN-STAN	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
57	Maharani Cahyaning Utami (Tk I)	PKN-STAN	21-26 Agustus 2022	NASIONAL
58	Aura Syahira Nugroho (Tk I)	PKN-STAN	21-26 Agustus 2022	NASIONAL

- Layanan Perkantoran
Politeknik Imigrasi dalam menjalankan kegiatannya di dukung dengan layanan perkantoran yang menunjang kegiatan sehari-hari, berikut rincian anggaran Politeknik Imigrasi:

Realisasi Anggaran Poltekim

No	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Prosentase
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	9,874,499,000	9,764,508,841	98,8%
1	Layanan BMN	224,535,000	219,035,000	97,5%
2	Layanan Umum	295,020,000	295,020,000	100%
3	Layanan Perkantoran	9,354,944,000	9,250,453,841	98,8%

	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	163,259,000	163,259,000	100%
1	Layanan Sarana Internal	163,259,000	163,259,000	100%
	Layanan Manajemen SDM Internal	29,803,511,000	29,788,173,321	99,9%
1	Layanan Manajemen SDM	2,922,256,000	2,920,514,796	99,9%
2	Pendidikan Taruna TK I Politeknik Imigrasi	5,458,074,000	5,455,970,875	99,9%
3	Pendidikan Taruna TK II Politeknik Imigrasi	6,057,015,000	6,056,792,500	99,9%
4	Pendidikan Taruna TK III Politeknik Imigrasi	5,897,421,000	5,896,979,500	99,9%
5	Pendidikan Taruna TK IV Politeknik Imigrasi	6,012,317,000	6,001,940,500	99,8%
6	Masa Basis Calon Taruna Politeknik Imigrasi	3,456,428,000	3,455,975,150	99,9%
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	764,196,000	764,186,500	99,9%
1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7,350,000	7,350,000	100%
2	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	737,346,000	737,336,500	99,9%
3	Layanan Manajemen Keuangan	19,500,000	19,500,000	100%
	Jumlah	40,605,465,000	40,480,127,662	99,6%

Dari sisi anggaran capaian Polteknik Imigrasi (Poltekim) pada tahun 2022 terealisasi sebanyak Rp. **40.480,127,662,-** (99,6%) dari pagu anggaran yang telah ditargetkan sebesar Rp. **40.605.465.000,-**

7. Balai Pendidikan Pelatihan Diklat Hukum dan HAM

Capaian kinerja Balai Diklat Hukum dan HAM pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Capaian Kinerja Balai Diklat Hukum dan HAM

Indikator	Kinerja		% Capaian	Anggaran (Rp)		% Capaian
	Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Jumlah Penyelenggaraan	288	288	100%	38.656.349.000	38.126.126.093	98,6%

Diklat di Wilayah					
Jumlah Lulusan Diklat Wilayah	13023	13023			
Total	13311	13311			

**Tabel Capaian Pengembangan Kompetensi Bentuk Pelatihan
Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM**

No	Balai Diklat Hukum dan HAM	Nama Pelatihan	Penutupan	Output
1.	Kepulauan Riau	Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Dasar	14 s/d 28 Januari	80
		Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Lanjutan	14 s/d 27 Januari	80
		Pelatihan Pelaksana Pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat	15 s/d 18 Februari	80
		Pelatihan BTCLS (Basic Trauma Cardiac Live Support)	01 s/d 09 April	40
		Pelatihan Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas	02 s/d 11 Februari	80
		Pelatihan Teknis dan Strategi Membangun Publikasi Layanan	15 s/d 24 Februari	60
		Pelatihan Penyidikan Keimigrasian Tingkat Dasar	08 s/d 25 April	59
		Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III	17 Mei s/d 07 Desember 2022	1.183
	JUMLAH			1.662
2	Jawa Tengah	Pelatihan Protokoler	26 Januari s.d 29 Januari 2022	40
		Pelatihan Status Keimigrasian	11 s.d 22 Februari 2022	40
		Pelatihan Teknis Pendetensian dan Deportasi	18 Februari s.d 4 Maret 2022	39
		Pelatihan Pembentukan Kedisiplinan Pemasaryakatan (Kesamaptaan)	20 s.d 31 Maret 2022	40

		Pelatihan Teknis Membangun Pelayanan Publikasi	19 s.d 28 April 2022	40
		Pelatihan Basic Trauma Cardiac Live Support (BTCLS)	6 s.d 15 Juni 2022	40
		Pelatihan Dasar CPNS Gelombang I	Agustus 2022 23 Mei s.d 31	639
		Pelatihan Dasar CPNS Gelombang II	Oktober 2022 13 Juli s.d 19	639
		Pelatihan Dasar CPNS Gelombang III	01 September s.d 07 Desember 2022	495
JUMLAH				2.012
3	Sulawesi Utara	Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Dasar Angkatan V	25 Januari s/d 05 Februari	40
		Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Lanjutan Angkatan V	15 Februari s/d 25 Februari	40
		Pelatihan Protokoler Angkatan III	08 Februari - 11 Februari	30
		Pelatihan Protokoler Angkatan IV	28 Maret - 31 Maret	30
		Pelatihan Teknis Pendetensian dan Deportasi Angkatan I	14 Maret s/d 24 Maret	40
		Pelatihan Kesamaptaan Angkatan I	21 Juni s/d 02 Juli	40
		Pelatihan Kesamaptaan Angkatan II	07 November s/d 18 November	40
		Pelatihan Kesamaptaan Angkatan III	07 November s/d 18 November	40
		Pelatihan Kesamaptaan Angkatan IV	21 November s/d 02 Desember	40
		Pelatihan Kesamaptaan Angkatan V	21 November s/d 02 Desember	40
		Pelatihan Kehumasan Angkatan II	13 Juli s/d 15 Juli	30
		Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Angkatan I	17 Juli s/d 20 Juli	40
		Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Angkatan II	20 Juli s/d 23 Juli	40
		Pelatihan Manajemen Risiko (MR) Angkatan I	11 September s/d 14 September	40
		Pelatihan Manajemen Risiko (MR) Angkatan I	14 September s/d 17 September	40
		Pelatihan Dasar CPNS Gelombang I (6 Angkatan)	10 Mei s/d 19 Agustus	234
		Pelatihan Dasar CPNS Gelombang II (6 Angkatan)	8 Juni s/d 14 September	240
		Pelatihan Dasar CPNS Gelombang III (6 Angkatan)	5 Juli s/d 11 Oktober	239
Pelatihan Dasar CPNS Gelombang IV (6 Angkatan)	1 Agustus s/d 7 No	237		

	katan)	vember	
	Pelatihan Dasar CPNS Gelombang V (6 Angkatan)	29 Agustus - 2 Desember	254
	JUMLAH		1.774
	TOTAL		5.448

Tabel Capaian Pengembangan Kompetensi Bentuk Lainnya
Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM

No	Balai Diklat Hukum dan HAM	Nama Pelatihan	Penutupan	Output
1	Kep. Riau	<i>Community Of Practice</i>	25 Oktober s/d 08 Desember	60
		<i>Community Of Practice</i>	25 Oktober s/d 08 Desember	60
		<i>Community Of Practice</i>	25 Oktober s/d 08 Desember 2022	401
		Webinar Nasional dengan Tema "Electronic Visa On Arrival, Pemulihan Ekonomi Dan Sektor Pariwisata Serta Peningkatan Pengawasan Keimigrasian"	8 November 2022	879
	JUMLAH			1.400
2	Jawa Tengah	Webinar Tata Nilai ASN BerAKHLAK	31 Maret 2022	130
		Workshop Pembekalan Agenda Habitiasi bagi Calon Coach pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2022	19 – 20 Mei 2022	40
		Webinar Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Kemenkumham oleh Ombudsman Jateng	22 Juni 2022	231
		Webinar Tingkatkan Semangat Bela Negara Menyongsong 77 Tahun Indonesia Merdeka, Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat	16 Agustus 2022	1.775
		Webinar Pelayanan Publik	28 November 2022	1.775
	JUMLAH			3.951
3	Sulawesi Utara	Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima Bagi Pegawai Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara Melalui Sinergitas Dengan Badiklat Keagamaan Manado		13
		COP (Community of Practice) Dalam Rangka Mewujudkan Sinergitas Kehumasan UPT Untuk Mendukung Fungsi Government Public Relation Pada Jaringan Kanwil Kemenkumham		92

	Sulut		
	Seminar Hukum (Orang Tanpa Kewarganegaraan/Stateless)		225
	Training “Membangun Pola Pikir Budaya Kerja” dilingkungan Balai Diklat Hukum dan HAM Sulut		33
	Bimtek Penilaian Pengelolaan Kinerja Pegawai Jajaran Kanwil Sulawesi Utara		150
	Bimtek Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) jajaran Kanwil Sulut		40
	JUMLAH		553
	TOTAL		5.904



B. Implementasi Reformasi Birokrasi

Berdasarkan sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi yang tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MHH-19.OT.03.01 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2021-2024 dapat diinformasikan implementasi reformasi birokrasi Tahun 2022 sebagai berikut



PENGUATAN IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI

Tabel Implementasi Reformasi Birokrasi
BPSDM Hukum dan HAM

No	Program	Indikator Kegiatan (Road Map RB Kemenkumham)	Implementasi
1	<i>Manajemen Perubahan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim RB BPSDM Hukum dan HAM 2. Internalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tentang program-program percepatan Reformasi Birokrasi (RKT) 3. Internalisasi Tata Nilai "berAKHLAK" 4. Pembentukan Agen Perubahan BPSDM Hukum dan HAM 5. Inventarisasi daftar proyek perubahan pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> • SK Tim RB BPSDM Hukum dan HAM • Laporan Internalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi • Laporan Internalisasi Tata Nilai "berAKHLAK" • SK Agen Perubahan BPSDM Hukum dan HAM • Rekapitulasi Inventarisasi Daftar Proyek Perubahan Pegawai • Capture Pemanfaatan Teknologi dalam pekerjaan sehari-hari • Laporan Kegiatan Revolusi Mental • Laporan Pelatihan Asesor PMPRB unit Pusat • Rekapitulasi Pemetaan Proyek Perubahan yang telah terimplementasikan

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Pemanfaatan Teknologi dalam pekerjaan sehari-hari 7. Melakukan Kegiatan Revolusi Mental 8. Paltihan Asesor PMPRB Unit Pusat 9. Pemetaan Proyek Perubahan yang telah terimplementasi 10. <i>Benchlearning</i> (saling belajar dan tukar pengalaman) untuk Perbaikan kinerja Kementerian Hukum dan HAM 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kegiatan <i>Benchlearning</i>
2.	Penataan dan Penguatan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim Evaluasi Kelembagaan 2. Melaksanakan Analisis dan Evaluasi atas Kebijakan yang diterapkan 3. Inventarisasi Hasil Surevey Evaluasi Kelembagaan 4. Identifikasi dan Pemetaan Regulasi/Peraturan Perundang-Undangan 5. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri 	<ul style="list-style-type: none"> • SK Tim Evaluasi Kelembagaan • Laporan Rekomendasi Analisis dan Evaluasi atas Kebijakan yang diterapkan • Rekapitulasi Hasil Survey Responden Kelembagaan • Laporan Identifikasi dan Pemetaan Regulasi • Usulan Penyusunan Rancangan Menteri Hukum dan HAM
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim Evaluasi Kelembagaan 2. Melakukan Survey kepada Responden (Unit Eselon I) 3. Analisis Data Survey Evaluasi Kelembagaan 	<ul style="list-style-type: none"> • SK Tim Evaluasi Kelembagaan • Rekapitulasi Hasil Survey Responden Kelembagaan • Laporan Evaluasi Kelembagaan
4	Penataan Tatalaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim Tata Kelola SPBE 2. Pembentukan Tim Pelaksana Ahli Media Arsip BPSDM Hukum dan HAM 3. Pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • SK Tim Reformasi Birokrasi BPSDM Hukum dan HAM • SK tim Pelaksanaan Ahli Media Arsip BPSDM Hukum dan HAM • Laporan Pelaksanaan Implementasi Ahli Media Arsip Manual • SK Tim Pengawasan Kearsipan

		<p>Implementasi Ahli Media Arsip Manual dengan jra berketerangan permanen</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pembentukan Tim Pengawasan kearsipan BPSDM Hukum dan HAM 5. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik 6. Implementasi E-Government yang selaras dengan Grand Design IT Kemenkumham 7. Pengembangan Proses Bisnis Instansi dan Unit 8. Evaluasi Standar Operasional Prosedur 9. Sosialisasi Permenkumham tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi 10. Evaluasi Pelaksanaan Permenkumham tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi 11. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi SOP 12. Evaluasi dan Penyelarasan Probis Level 2 Unit Utama dan SOP Unit Utama 	<p>BPSDM Hukum dan HAM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Monitoring dan evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik • <i>Capture</i> Aplikasi SPBE • Peta Proses Bisnis Level 2 SOP Makro • Laporan Evaluasi SOP • Laporan Sosialisasi Permenkumham tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi • Evaluasi Pelaksanaan Permenkumham tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi • Laporan Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi SOP • Laporan Evaluasi dan Penyelarasan Proses Bisnis Level 2 Unit Utama dan SOP Unit Utama
5	<p>Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia dan Aparatur Sipil Negara</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran kinerja individu secara berkala setiap bulan 2. Evaluasi dan Tindak Lanjut Implementasi Peningkatan Disiplin Pegawai 3. Analisis Kebutuhan Pegawai Kemenkumham 4. Penguatan Asesor Internal dan Pengelola 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pengukuran Kinerja Individu • Laporan evaluasi dan tindak lanjut Implementasi Peningkatan Disiplin Pegawai • Usulan Analisis Kebutuhan Pegawai Kemenkumham • Laporan Penguatan Asesor Internal dan Pengelola <i>Assessment Centre</i> • Laporan Evaluasi Fungsi <i>Assessment</i>

		Assessment Centre	Centre
		5. Evaluasi Fungsi Assessment Centre	
6	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coaching dan Mentoring terkait capaian kinerja secara berkala 2. Penyajian LAKIP Tahun 2021 3. Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja 4. Publikasi DIPA dan pelaporan kinerja pada website dan media sosial 5. Monitoring dan evaluasi Realisasi Anggaran 6. Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan evaluasi perjanjian kinerja dan target kinerja 7. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Monev Realisasi Anggaran 8. Pelaksanaan tindaklanjut atas temuan dan rekomendasi reuiu Tim Pemeriksa Internal (Evaluasi SAKIP 2021) 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan coaching dan mentoring terkait capaian kinerja secara berkala • Laporan Penyajian LAKIP Tahun 2021 • Laporan Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja • Laporan Publikasi DIPA dan pelaporan kinerja pada website dan media sosial • Laporan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran • Laporan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan evaluasi perjanjian kinerja dan target kinerja • Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Monev Realisasi Anggaran
7	Penguatan Akuntabilitas Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan SK Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP 2. Tindaklanjut Rekomendasi SPIP dan Inspektorat Jenderal Tahun 2021 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPIP secara berkala 4. Pengelolaan SK Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 5. Tindaklanjut rekomendasi manajemen resiko dari Inspektorat Jenderal 	<ul style="list-style-type: none"> • SK Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP • Laporan tindaklanjut Rekomendasi SPIP dan Inspektorat Jenderal Tahun 2021 • Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPIP secara berkala • SK Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik • Laporan Tindaklanjut rekomendasi manajemen resiko dari Inspektorat Jenderal Tahun 2021 • Laporan Sosialisasi rencana aksi hasil rekomendasi Inspektorat Jenderal Tahun 2021 • Laporan Monitoring dan evaluasi rencana aksi hasil rekomendasi

		<p>Tahun 2021 SPIP</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Sosialisasi rencana aksi hasil rekomendasi Inspektorat Jenderal 7. Monitoring dan evaluasi rencana aksi hasil rekomendasi Inspektorat Jenderal tahun 2021 8. Penyusunan Manajemen Resiko 9. Coaching dan mentoring /Sosialisasi penerapan manajemen resiko 10. Pengelolaan SK Tim Benturan Kepentingan 11. Evaluasi dan Tindaklanjut Benturan Kepentingan 12. Tindaklanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi 13. Penyusunan Laporan perolehan PNBP 14. Penyusunan Laporan pelaksanaan pengelolaan BMN (Rumah Negara, Tanah Negara, Kendaraan Bermotor) 15. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 16. Pemantauan atas penanganan resiko 17. Sosialisasi Benturan Kepentingan 	<p>Inspektorat Jenderal tahun 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Sosialisasi rencana aksi hasil rekomendasi Inspektorat Jenderal • Laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi hasil rekomendasi Inspektorat Jenderal tahun 2021 • Laporan penyusunan manajemen resiko • Laporan Coaching dan mentoring /Sosialisasi penerapan manajemen resiko • SK Tim Benturan Kepentingan • Laporan evaluasi dan tindaklanjut Benturan Kepentingan • Laporan tindaklanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi • Laporan perolehan PNBP • Laporan pelaksanaan pengelolaan BMN (Rumah Negara, Tanah Negara, Kendaraan Bermotor) • Laporan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBB • Pemantauan atas penanganan resiko • Laporan sosialisasi benturan kepentingan
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi hasil survey kepuasan masyarakat 2. Pelaksanaan kampanye publik dengan pembuatan bahan-bahan informasi 3. Penyelesaian Tindaklanjut Laporan 4. Pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan publikasi hasil survey kepuasan masyarakat • Laporan Pelaksanaan kampanye publik dengan pembuatan bahan-bahan informasi • Laporan penyelesaian tindaklanjut laporan • Laporan Pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat

	<p>memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan terjangkau</p> <p>5. Penetapan SK Sistem Pemberian Kompetensi bagi penerima layanan</p> <p>6. Sosialisasi/Publikasi 6 Komponen <i>Service Delivery</i> dalam dokumen standar pelayanan</p> <p>7. Publikasi Maklumat Pelayanan</p> <p>8. Pengelolaan Pelayanan Publik</p> <p>9. Inovasi Pelayanan Publik</p>	<p>dan terjangkau</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Sistem Pemberian Kompetensi bagi penerima layanan • Laporan dan <i>Capture Sosialisasi/Publikasi 6 Komponen Service Delivery</i> dalam dokumen standar pelayanan • Dokumentasi Publikasi Maklumat Pelayanan • Laporan pengelolaan pelayanan publik • Laporan inovasi pelayanan publik
--	--	--

C. Kegiatan Kerjasama BPSDM Hukum dan HAM

Selain melaksanakan kegiatan di dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, BPSDM Hukum dan HAM juga melaksanakan kegiatan kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum. Tujuan dari kerja sama ini adalah meningkatkan kompetensi dan kemampuan pegawai Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam memahami dan melaksanakan hukum sesuai dengan bidang tugasnya melalui Pendidikan Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum



D. Prestasi BPSDM Hukum dan HAM

Selain berhasil melaksanakan tugas dan fungsi sebagai organisasi yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi sumber daya manusia hukum dan HAM, BPSDM juga berhasil memperoleh beberapa prestasi antara lain:

1. Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan Akreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan Nasional II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Pelatihan Dasar CPNS.



2. Akreditasi Lembaga Pelatihan Pegadaan Barang/Jasa



3. Peringkat 1 Penilaian Kompetensi Kategori Kementerian Tipe Besar



4. Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM

Target kinerja sebagai bentuk percepatan pencapaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM wajib dilaksanakan oleh semua Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Di dalam target kinerja tersebut telah ditetapkan beberapa kegiatan yang sesuai dengan pencapaian perjanjian kinerja pada unitkerja tersebut, termasuk BPSDM Hukum dan HAM

TABEL TARGET KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM

No.	Target Kinerja	Perjanjian Kinerja	Capaian	Nilai
1	Meningkatkan kompetensi strategis SDM di bid. Hukum dan HAM	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	Penilaian Preferensi Kompetensi Metode <i>online</i> di lingkungan Kemenkumham	100
2	Meningkatkan kompetensi strategis SDM di bid. Hukum dan HAM	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	Penilaian Kompetensi dan Potensi bagi jabatan Administrasi /Fungsional, sebanyak 900 pegawai	100
3	Meningkatkan kompetensi strategis SDM di bid. Hukum dan HAM	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi	Peta Jalan Sistem Informasi Pengembangan Sumber Daya	100

		jabatan	Manusia di BPSDM	
4	Meningkatkan kompetensi strategis SDM di bid. Hukum dan HAM		Mewujudkan <i>Corporate Culture/</i> Budaya Organisasi BerAKHLAK di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM	100
5	Meningkatkan kompetensi strategis SDM di bid. Hukum dan HAM	Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Fungsional Analisis Hukum	100
6	Meningkatkan kompetensi strategis SDM di bid. Hukum dan HAM	Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi alumni peserta pelatihan Tahun 2021 pada Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan, sebanyak 1.811 alumni peserta pelatihan	100
7	Meningkatkan kompetensi strategis SDM di bid. Hukum dan HAM	Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi alumni pelatihan Tahun 2021 pada Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM, sebanyak 1.995 alumni peserta pelatihan	100
	Meningkatkan kompetensi strategis SDM di bid. Hukum dan HAM	Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	Sertifikasi Dosen POLTEKIP (20 Dosen)	100
	Meningkatkan kompetensi strategis SDM di bid. Hukum dan HAM	Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	Pengembangan Kurikulum Pendidikan POLTEKIP dan POLTEKIM	100
	Meningkatkan kompetensi strategis SDM di bid. Hukum dan HAM	Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	Akreditasi POLTEKIM	100

Tabel capaian target kinerja diatas menunjukkan bahwa BPSDM Hukum dan HAM telah melaksanakan target kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan timeline yang telah ditentukan serta data dukung yang sesuai.

Disamping melaksanakan target kinerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM, BPSDM Hukum dan HAM juga memiliki kewajiban untuk memvalidasi dan mengevaluasi pelaksanaan target kinerja di lingkungan Kantor Wilayah yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi dalam rangka pemenuhan sasaran strategis meningkatkan kompetensi strategis meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian Hukum dan HAM antara lain:

1. Peningkatan kapasitas SDM Wilayah melalui implementasi *Corporate University*;
2. Tersusunnya *Best Practice* di Kantor Wilayah.

Berikut hasil verifikasi terhadap pelaporan data dukung pelaksanaan target kinerja BPSDM Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Tabel Capaian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM

SASARAN STRATEGIS	PERJANJIAN KINERJA	TARGET AKSI	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN
Meningkatkan kompetensi strategis SDM di bid. Hukum dan HAM	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	Peningkatan kapasitas SDM Wilayah melalui implementasi <i>Corporate University</i>	B03: Pelaksanaan <i>workshop/sosialisasi/bimtek</i> terkait Zona Integritas B06 : Pelaksanaan <i>workshop/sosialisasi</i> terkait Nilai-Nilai Reformasi Birokrasi B09: Pelaksanaan <i>workshop/sosialisasi/bimtek</i> terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah B12: Pelaksanaan <i>workshop/sosialisasi/bimtek</i> Terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	B03: Output sebanyak 3.329 peserta B06: Output sebanyak 6.031 peserta B09: Output sebanyak 2.364 peserta B12: Output sebanyak 1.499 peserta
		Tersusunnya <i>Best Practice</i>	B06 Tersusunnya 2 (dua)	B06 66 modul <i>best</i>

		practice di Kantor Wilayah	best practice Kementerian Hukum dan HAM <i>Corporate University</i> dalam bidang Pemasarakatan dan Imigrasi B12 Tersusunnya 2 (dua) <i>best practice</i> Kementerian Hukum dan HAM <i>Corporate University</i> dalam bidang Dukungan Manajemen dan Pelayanan Hukum dan HAM	<i>practie</i> B12 66 modul <i>best practice</i>
--	--	----------------------------	---	--

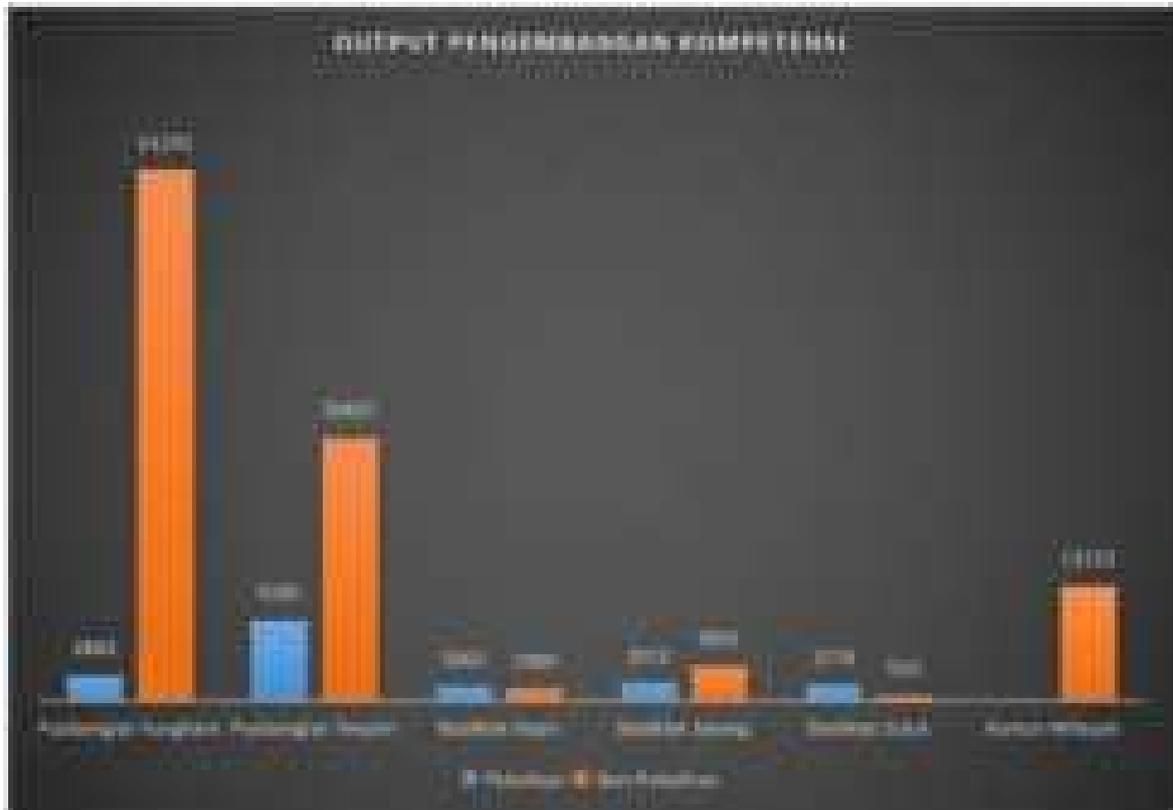
PENUTUP



BAB IV PENUTUP

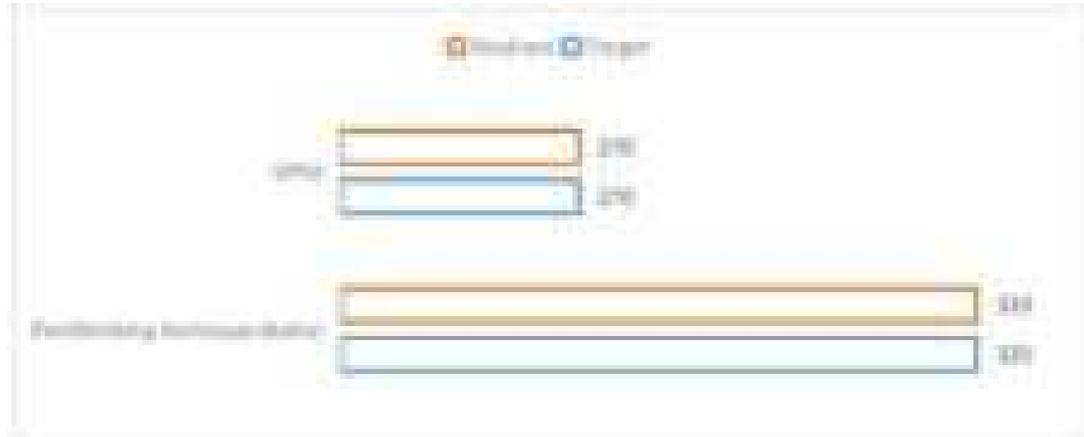
A. Simpulan

1. Berdasarkan data dari hasil analisa dan evaluasi yang dilakukan, diketahui pada tahun 2022 BPSDM Hukum dan HAM telah berhasil melakukan pengembangan kompetensi kepada 128.440 orang pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM baik dengan DIPA BPSDM Hukum dan HAM maupun anggaran PNPB dari Unit Eselon I lainnya dengan rincian sebagai berikut :



2. Selain melakukan pengembangan kompetensi terhadap Aparatur Kementerian Hukum dan HAM, pada Tahun 2022 BPSDM Hukum dan HAM juga telah melakukan pengembangan kompetensi terhadap 590 Aparatur Penegak Hukum dan Instansi terkait lainnya yang termasuk dalam prioritas nasional melalui penyelenggaraan diklat Pembimbing Kemasyarakatan sebanyak 320 orang dan diklat Sistem Peradilan Pidana Anak sebanyak 270 orang, Berikut rincian:

Grafik Capaian Diklat Prioritas Nasional



3. Selain bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan BPSDM Hukum dan HAM juga memiliki tugas melakukan penilaian kompetensi aparatur Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini merupakan tanggung jawab Pusat Penilaian Kompetensi sebagai salah satu Unit Eselon II di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM melaksanakan tugas tersebut dengan menyelenggarakan kegiatan Uji Kompetensi, *Assessment Center*, Penilaian Kompetensi, terhadap pegawai di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM yang total selama Tahun 2022 sebanyak 12.938 pegawai.
4. BPSDM Hukum dan HAM menyelenggarakan kegiatan pendidikan kedinasan di bidang Pemasarakatan dan Keimigrasian. Pendidikan kedinasan di bidang Pemasarakatan diselenggarakan oleh Politeknik Ilmu Pemasarakatan pada Tahun 2022 berhasil meluluskan taruna sebanyak 300 orang. Sedangkan pendidikan kedinasan di bidang Imigrasi diselenggarakan oleh Politeknik Imigrasi, pada Tahun 2022 telah meluluskan 290 taruna.
5. Penyerapan Anggaran BPSDM Hukum dan HAM Per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 228.392.914.900,-** atau telah mencapai **97,65%** dari anggaran yang terdapat dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2021 sebesar **Rp. 233.879.511.000,-**, berikut rinciannya:

Realisasi Anggaran BPSDM Hukum dan HAM

NO	UNIT / SATKER	OUTPUT			ANGGARAN*		
		Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Pusbanglat Fungsional dan HAM	1.928	64.173	3.328,4	9.964.138.000,-	9.278.358.752,-	93,12
2	Pusbanglat Teknis dan Kepemimpinan	10.256	39.692	387,01	11.887.966.000,-	11.141.812.491,-	93,72
3	Pusat Penilaian Kompetensi	14.450	12.938	1.125,8	2.881.200.000,-	2.822.627.967,-	97,97
4	Sekretariat BPSDM	Layanan	Layanan	-	75.033.005.000,-	73.570.032.358,-	98,05
5	Balai Diklat Hukum dan HAM Kep. Riau	2.136	3.062	143,42	11.434.479.000,-	11.320.648.813,-	99,00
6	Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah	1.900	5.963	313,8	20.999.928.000,-	20.506.419.479,-	97,65
7	Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara	1.615	2.327	144,08	15.606.385.000,-	15.264.264.439,-	97,81
8	Politeknik Imigrasi	1.188	1.188	100	40.605.465.000,-	40.480.127.662,-	99,69
9	Politeknik Ilmu Pemasaryakatan	1.305	1.305	100	41.024.600.000,-	40.826.215.537,-	99,52
Total		32.285	128.155	396,9%	229.437.166.000,-	225.210.507.498,-	98.16

6. BPSDM Hukum dan HAM selaku penyelenggara diklat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun 2022 terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- a) Penyebaran covid-19 di Indonesia, mengharuskan penghentian kegiatan pendidikan dan pelatihan di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM. Hal ini berdampak pada perubahan metode pembelajaran klassikal menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ)
- b) Dalam pelaksanaan pembelajaran metode PJJ, kendala yang sering dihadapi adalah kualitas jaringan yang kurang memadai sehingga mempengaruhi kualitas belajar mengajar. Disamping itu kurangnya interaksi langsung antara pengajar dan peserta serta interaksi antar peserta juga mempengaruhi

kualitas hasil pelatihan dibanding pembelajaran dengan tatap muka langsung.

- c) Metode pelatihan *e-learning* sebagai salah satu cara pengembangan kompetensi pegawai, tetapi pada kenyataannya masih kurang diminati oleh pegawai, hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya jumlah peserta yang dinyatakan tidak lulus.
- d) Kurangnya jumlah tenaga asesor yang ada dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM jika harus melakukan penilaian kompetensi kepada 15 ribu orang pegawai per tahunnya.
- e) Masih banyaknya revisi kegiatan diklat sehingga mengganggu jadwal pelaksanaan kegiatan diklat dan *disburstmen plan* yang telah disusun pada awal tahun.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan kinerja BPSDM hukum dan HAM kedepannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan metode pembelajaran jarak jauh perlu segera dilakukan pelatihan tentang penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh bagi tenaga pengajar dan penyelenggara pelatihan.
2. Untuk meningkatkan jumlah lulusan peserta pelatihan *e-learning* perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Pembekalan atau pengarahan kepada para pimpinan unit kerja dan satuan kerja untuk mendukung pegawai dilingkungan kerjanya dalam mengikuti pelatihan metode *e-learning*;
 - Memberlakukan sistem *reward and punishment* pada pelaksanaan pelatihan *e-learning*, contohnya memasukkan kegiatan pelatihan ke dalam Sasaran Kinerja Pegawai, sehingga kelulusan peserta diklat bisa berpengaruh terhadap nilai SKP pegawai yang bersangkutan.
 - Melakukan evaluasi terhadap metode dan kurikulum penyelenggaraan pelatihan metode *e-learning* yang telah dilaksanakan secara berkala.
3. Penambahan pegawai jabatan fungsional tertentu assessor di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM baik melalui jalur inpassing maupun perekrutan CPNS.

4. Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan *disburstmen plan* atau kalender diklat dan Rencana Penarikan Dana yang telah ditentukan serta lebih selektif dalam melakukan pergeseran anggaran revisi DIPA.
5. Pemantauan terhadap capaian Perjanjian Kinerja Pimpinan Tinggi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM secara berkala sehingga dapat dipantau perkembangan dan kendala yang dihadapi.